

**Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris
Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)



Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Oleh

Rasdiana

NIM: 10100111043

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasdiana

NIM : 10100111043

Tempat/ Tanggal Lahir : Sinjai / 5 November 1993

Jur/ Prodi/ Konsetrasi : Peradilan Agama

Fakultas / Program : Syariah dan Hukum

Alamat : Makassar, BTP Blok F No. 295

Judul : Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris
Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (*Studi
Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Maret 2015

Penyusun,

Rasdiana
NIM : 10100111043

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B)”, yang disusun oleh Rasdiana, NIM : 10100111043, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 M, bertepatan dengan, 3 Jumadil Akhir 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa kali perbaikan).

Makassar, 24 Maret 2015

3 Jumadil Akhir 1436 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof.Dr. H. Ali Parman, M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Abd Halim Talli M.Ag (.....)

Munaqisy I : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag (.....)

Munaqisy II : Dr. Azman, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. Supardin, M.HI (.....)

Pembimbing II : Dr. Abdillah Mustari, S.Ag.,M.Ag (.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم اشهد الله ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد
ان محمدا عبده ورسوله نحمده ونستعينه و نستعفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سينا اعدا
لنا, من يهده الله فلا مضل له, و من يضل الله فلا هادي له.

Tiada kata yang paling baik dan paling sempurna kecuali puji syukur kepada Allah swt, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai disusun. Disadari bahwa segala daya dan upaya yang telah dilakukan ini tidak dapat berhasil tanpa izin dan kehendak-Nya.

Shalawat dan salam juga dihanturkan untuk Baginda Rasulullah saw, beserta para sahabat, keluarga serta seluruh umatnya sampai akhir zaman, berkat kehadiran beliaulah sehingga ummatnya dapat merasakan terangnya kehidupan yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran beliau.

Disadari pula bahwa skripsi ini dapat terwujud tidak lepas dari bantuan segala pihak, yang tidak mungkin dapat disebut satu persatu. Dirasa perlu menyampaikan ucapan terimah kasih dan penghargaan yang tulus, semoga bantuan tersebut bernilai sebagai ibadah dan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang mulia dan sangat saya banggakan, Ayahanda Dr.H.Wirhanuddin,M.H. dan Ibunda Hj. Sahwa.S.Ag. yang telah memelihara dan mendidik serta menjadi panutan dalam meraih kesuksesan dalam dunia pendidikan dan kesuksesan menjadi manusia yang berguna.

senantiasa menjadi motivator dalam menjalani kehidupan serta memberikan doa dan dorongan agar anak-anaknya dapat menjadi hamba yang taan kepada sang Maha pencipta Allah swt. dan sesama manusia.

2. Kepada orang tua Siti Parisa yang telah menjadi orang tua kedua yang senantiasa memberi dorongan dan menyemangati dalam segala situasi, selalu menemani dalam menempuh pendidikan mulai sejak Taman Kanak-kanak hingga keperguruan Tinggi.
3. Rektor UIN Alauddin Makassar Bapak Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, HT., M.S. yang telah menerima sebagai mahasiswa Program Strata satu UIN Alauddin Makassar dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dekan fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. atas bantuannya selaku Pimpinan Fakultas.
5. Bapak Dr.H.Abdul Halim Talli,M.Ag dan Ibu Andi Intan Cahyani,M.Ag masing-masing selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan beserta Stafnya yang telah banyak memberikan saran yang konstruktif kepada penulis.
6. Pembimbing I yang terhormat bapak Dr.Supardin,M.HI, Pembimbing II yang terhormat bapak Dr. Abdillah Mustari S.Ag.,M.Ag. kesemuanya telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan koreksi sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi ini.
7. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan konstribusi Ilmiah yang menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepala perpustakaan dan seluruh stafnya yang telah melayani sejak perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
9. Hakim, Panitera dan Pegawai Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B yang telah membantu saya selama melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B demi penyusunan skripsi ini.
10. Untuk saudara-saudara ku, kakak serta adik yang telah menemani dan membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Untuk sahabat-sahabat ku yang baik dan menyenangkan yang selalu menemani sejak awal perkuliahan, sampai pada saat penyusunan skripsi, selalu menemani dan membantu dalam segala hal.
12. Untuk teman-teman angkatan dua ribu sebelas Jurusan Peradilan Agama.
13. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga skripsi ini berguna kepada Agama, Bangsa dan Masyarakat pada umumnya.



Makassar,

Rasdiana
Nim: 10100111043

TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik diatas)

ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	;	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fathah	a	A

ا	Kasrah	i	I
و	damrah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وِ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ... / آ...	Fathah dan alif atau yā	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan yā	ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'* marbūṭah ada dua yaitu: *tā'* marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā'* marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : rauḍah al-aṭfāl
المدينة الفاضلة : al-madīnah al-fāḍilah
الحكمة : rauḍah al-aṭfāl

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا : rabbanā

نجينا : najjainā

الحق : al-ḥaqq

نعم : nu”ima

عدو : ‘duwwun

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلازة : al-zalzalah (az-zalzalah)

الفلسفة : al-falsafah

البلاد : al-bilādu

7. Hamzah.

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تأمرون : ta’murūna

النوع : al-nau’

شيء : syai’un

أمرت : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafẓ al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍā ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاَللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *billāh dīnullāh*

Adapun *tā’marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

هُم فِى رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ġalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad
(bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid
Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : subḥānahū wa ta'ālā

saw. : ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

a.s. : 'alaihi al-salām

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. : Wafat tahun

QS.../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4

HR : Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama :Rasdiana

Nim :10100111043

Judul :Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (*Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014*)

Skripsi ini berjudul tentang Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Keluarga (studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B). Dalam pembahasannya penulis menarik sebuah pokok permasalahan yaitu Bagaimana Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Keluarga ? dengan Sub Masalahnya yaitu: Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Penundaan Pembagian Keluarga?, dan bagaimana cara penyelesaian kasus penundaan pembagian harta warisan?.

Adapun inti dari pembahasan ini adalah didalam Hukum Islam memerintahkan agar sesegera mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila telah selesai diselenggarakan pengurusan Jenazah, agar supaya tidak terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik internal oleh para ahli waris, banyak dampak negatif yang terjadi bila terjadi penundaan pembagian harta warisan dan hal ini bisa menjadi konflik yang berkepanjangan sebab memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya, bila telah terjadi kasus penundaan pembagian harta warisan maka cara penyelesaian yang tepat adalah melalui lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang bahwa pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Undang-undang No.7 Tahun 1989 pasal 1 ayat (1)). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan,.Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, c. wakaf dan Shadaqah

Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan yang terjadi,diselesaikan secara litigasi menurut Hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama, karena penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Hukum yang berlaku, keputusan hakim pada pengadilan itu bersifat mengikat dan memaksa untuk dilaksanakan kepada para pihak yang bersengketa, serta cara penyelesaiannya juga berdasarkan hukum Islam yang telah dileburkan menjadi Kompilasi Hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang lain dari masyarakat itu. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka tidak cukup dikatakan bahwa hubungan-hubungan hukum itu juga lenyap seketika itu. Oleh biasanya pihak-pihak yang telah di tinggalkan dari pihak yang meninggal tidak merupakan seorang saja atau sebuah barang saja. Oleh karena itu, mereka yang telah meninggal dunia masih berpengaruh langsung pada kepentingan-kepentingan dari berbagai orang lain di masyarakat. Selama masih hidup maka orang itu membutuhkan pemeliharaan jika tidak dikehendaki kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Untuk melanjutkan pemeliharaan-pemeliharaan hak-hak tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa melalui aturan-aturan tertentu, melainkan harus melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan hukum.

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara, seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.

Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna, tanpa meninggalkan bagi seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Qur'an

merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma'. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.

Islam sangat memperhatikan persoalan hukum waris ini, sehingga perlu dijelaskan terperinci dalam Al-Qur'an karena hukum waris merupakan sarana pokok dalam hal pemilikan harta benda, sedangkan harta benda merupakan tulang punggung kehidupan individual maupun komunal. Dengan pembagian warisan yang benar, akan timbullah rasa tanggung jawab sosial dan akan terjadi pula siklus kenikmatan hidup.

Sudah menjadi ketentuan Allah swt, bahwa setiap manusia dalam meniti perjalanan hidupnya di dunia akan melewati beberapa masa. Masa manusia dilahirkan ke dunia ini, masa manusia ditakdirkan hidup setelah dilahirkan dan masa meninggal dunia, dalam waktu yang telah ditakdirkan pula oleh Allah swt, masa-masa yang dilalui itu tidak lepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt,

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt, yang hidup di dunia ini, mempunyai peran ganda, peran ganda manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan di dunia, yakni manusia berperan sebagai makhluk individu dan manusia berperan sebagai makhluk sosial.

Sebagai makhluk sosial Ibnu Khaldun seorang filosof Islam yang sangat populer dan termuka mengatakan bahwa manusia memiliki tabiat sosial. Manusia harus memiliki hubungan sosial. Hubungan sosial itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Jika hubungan sosial tidak terwujud hal-hal yang dikehendaki oleh Allah swt, berupa memakmurkan dunia dan menjadikan Khalifah

di muka Bumi.¹ Manusia selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian hidup berorganisasi, hidup bersama merupakan suatu gejala biasa bagi seorang manusia. Maka dari itu manusia saling membutuhkan satu sama lain.

Meskipun manusia sadar akan saling ketergantungan antara mereka satu sama lain, tetapi tidak jarang diantara mereka menghiraukan hal tersebut. Mereka menganggap bisa melakukan hal sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain asalkan mereka memiliki segalanya, dalam hal ini adalah harta. Salah satu yang menjadi sumber harta seseorang adalah warisan yang didapatkan dari sipewaris yang telah meninggal dunia. Namun perlu diketahui bahwa ahli waris itu bukan Cuma seorang saja, akan tetapi lebih dari satu, sebab setiap manusia di muka bumi ini memiliki keluarga besar. Oleh karena itu dalam pewarisan sudah menjadi ketentuan bahwa ahli waris itu pasti lebih dari satu orang, maka dari itu perlu diketahui siapa-siapa yang saja yang menjadi ahli waris yang berhak menerima warisan si pewaris. Agar tidak terjadi sistem kewarisan secara individual atau kolektif. Yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan, dikutip dalam sebuah hadis.

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلا و الى رجل ذكر (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah saw., bersabda: Bagikanlah harta antara pemilik bagian tertentu menurut kitab Allah. Adapun kelebihanannya, maka untuk lelaki yang paling dekat. (Hadist riwayat Muslim No. 1615).²

¹Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Masturi Ilham et.al.(cet I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011),h.69-71.

²Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (t.t: Al-Maktabahas-sikapiyyah,t.th),h.2.

Penjelasan Kalimat:

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata,” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, :” Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya (yaitu 6 bagian yang diterangkan dalam Al-Qur’an lengkap dengan yang berhak menerimanya) selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat. (ada perbedaan diantara para ulama tentang faedah penyebutan laki-laki dengan sifat kelaki-lakian dan kekerabatan; pengulangan sifat itu sebagai bentuk penguat (ta’kid). Banyak sekali penjelasan tentang hal itu, akan tetapi faedahnya sedikit sekali.

Bagian warisan yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an ada enam; 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6. Maksud dari ahli warisnya’ adalah orang yang berhak mendapatkan bagian tersebut berdasarkan ketentuan dari Allah swt. Ibnu Baththal menerangkan bahwa :

laki-laki yang terdekat yang dimaksud adalah bila masih ada ashabah (ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan warisan tanpa ada ukuran tertentu) setelah ashabul furudh laki-laki (ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan Al-Qur’an), maka sisa warisan itu hanya dibagikan kepada yang paling dekat urutan nasabnya dengan mayit dan tidak dibagikan kepada yang jauh urutan nasabnya dan jika mereka saling berbagi rata, dan bukanlah maksudnya kerabat laki-laki yang langsung berhubungan dengan pihak bapak atau ibu; karena tidak ada yang paling berhak diantara mereka terhadap si mayit jika mereka sama kedudukannya.³

Ada beberapa kaidah prinsip-prinsip kewarisan Islam yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam. Di antaranya. Mahmud Syaltu, Grand Syakh Al-Azhar yang menyebutkan lima dasar pembinaan hak-hak kewarisan dalam Islam terutama terkait dengan hak mendapatkan bagian kewarisan itu sendiri (Istihqaq al- irtsi), yaitu:

³Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Jilid 2* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press. 2007), h.570.

1. Kewarisan didasarkan atas dua hubungan kekerabatan dan perkawinan ('alaqatay al-qarabah wa-al zaujiyyah). Kekerabatan meliputi: kekerabatan karena kelahiran orang tua dan anak. (al-aba wa-al-abna), dan kekerabatan persaudaraan dengan tiga seginya yakni saudara seibu dan seayah, saudara seayah dan saudara seibu.
2. Pengabaian gender dalam pengertian tidak mempersoalkan jenis kelaki-lakian atau kebapakan (patrilinear) maupun atau keibuan (matrilinear), maupun pengabaian usia dalam artian tidak mempersoalkan apakah ahli waris itu kanak-kanak atau dewasa.
3. Ahli waris garis keatas dan kebawah, yakni al-ushul dan al-furu, sama sekali tidak ada yang gugur apalagi digugurkan dari hak untuk mendapat warisan dalam keadaan apa dan kondisi bagaimanapun, meskipun dalam keadaan tertentu bisa jadi keberadaan ahli waris ini bisa mengubah bahkan mengubah-ubah bagian (warisan) anatara yang satu denganyang lain.
4. Pada dasarnya tidaka ada hak kewarisan bagi saudara-saudara laki-laki maupun saudara perempuan dengan sebab keberadaan kedua orang tua walaupun mereka menempati tempat ibu dengan hak perolehan 1/3 dan 1/6 bagian.
5. Manakala dalam kelompok ahli waris itu berkumpul laki-laki dan perempuan, maka ahli waris laki-laki memperoleh kelipatan dari bagian perempuan.⁴

⁴Sejumlah ulama kontemporer apalagi ulama-ulama zaman klasik selalu menyertakan prinsip hak mendapatkan kewarisan karena hubungan pemerdakaan budak (al-wala') disamping karena kekerabatan dan terutama karena perkawinan. Dahulu, perbudakan memang diakui keberadaannya secara hukum; kini perbudakan itu dalam bentuknya yang bagaimanapun, karenanya maka mudah di mengerti manakala sebagai pakar hukum Islam diantaranya Mahmud Syaltut, tidak adalagi mencantumkan al-wala' sebagai salah satu penyebab kewarisan. Salah satunya adalah Mahmud SYaltut.

Hukum kewarisan Islam pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahtoran hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.⁵ Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan islam ialah pengaturan tentang peralihan milik dari simayit (pewaris) kepada ahli warisnya.

Umumnya Negara-negara Islam dan/atau Negara-negara berpendudukan mayoritas Muslim telah memiliki undang-undang yang mengatur hukum kewarisan (faraidh) sebagai bagian dari hukum keluarga secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat muslim yang sampai sekarang belum/ tidak memiliki undang-undang kewarisan, terutama di Negara-negara berpendudukan minoritas islam. Akibatnya hukum waris islam terutama dengan teknik pembagian dilakukan secara tradisional dalam pengertian tidak melalui lembaga-lembaga resmi pemerintahan melainkan banyak juga yang dilakukan secara diam-diam melalui tokoh-tokoh personal tertentu terutama yang dianggap mengerti hukum islam dalam hal ini hukum faraidh. Bahkan juga di Negara-negara tertentu yang berpenduduk mayoritas muslim sekalipun. Termaksud Indonesia yang sampai sekarang masih banyak daerah-daerah yang penerapan hukum waris (pembagian harta warisnya) tetap saja dilakukan dihadapan ulama, kiyai ustadz, tuan guru, dan/atau tokoh agama setempat dengan suasana sederhana dan kekeluargaan. Namun hal inilah yang bisa menimbulkan perselisihan antara ahli waris, sebab penentuan pembagian harta warisan hanya dilakukan secara adat, dimana hal ini bisa menimbulkan perselisihan dikemudian hari sesama ahli waris.

⁵Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pasal 171, huruf a.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini perlu dibatasi oleh karena luasnya cakupan, baik dari segi objek penelitian, wilayah penelitian maupun waktu yang diperunakan sebagai berikut:

- a. Dari segi objek penelitian adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang telah berkekuatan Hukum tetap dan Hakim yang berada di Pengadilan Agama Pinrang.
- b. Dari segi Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B yang berlokasi di Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Dari segi waktu / Periode yang akan direncanakan untuk diteliti adalah Putusan dari Tahun 2011-2014.

2. Deskripsi Fokus

Agar mempermudah dalam memahami skripsi ini dan mencegah terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan maka akan dijelaskan mengenai judul skripsi yang akan dibahas. Judul skripsi yang akan dibahas yaitu: **“Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga”**

“Penundaan” adalah proses, cara, perbuatan menunda.⁶

“Waris” adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.⁷

“Kerukunan” adalah perihal hidup rukun; rasa rukun; kesepakatan.

“keluarga” ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi IV; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1503

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1556..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti serta dikaji yaitu :Bagaimana Dampak Penundaan Pembagian harta waris terhadap kerukunan Anggota keluarga?

Adapun yang menjadi sub masalah yaitu :

1. Bagaimana Hukum Islam Memandang kasus Penundaan Pembagian Harta waris ?
2. Bagaimana cara penyelesaian kasus sengketa kewarisan yang telah tertunda pembagiannya?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)”, setelah menelusuri berbagai referensi maka penulis menemukan beberapa buku yang digunakan sebagai sumber informasi mengenai pembahasan skripsi ini:

Buku *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, Oleh Harija Damis yang telah mempelajari dan menganalisis harta warisan, yang diangkat di Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor Perkara 64/pdt.G/2006/PA. Pinrang, pada kasus ini ia memaparkan bagaimana seorang janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 1946 dengan tujuh orang anak masing-masing dua anak orang perempuan dan lima orang anak laki-laki, satu orang anak kandung perempuan telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang duda dan tujuh orang anak kandung. Salah satu orang anak laki-lakinya meninggal tahun 1990 dan meninggalkan empat orang anak.

Setelah pewaris meninggal dunia, seluruh harta warisan dikuasai oleh istri (Janda) pewaris bernama H.P. Rajeng. Sebelum meninggal pada tahun 1999, telah menyerahkan penguasaan harta warisan itu kepada masing-masing anaknya. Harta warisan yang ditinggalkan pewaris adalah:

1. Tanah Kebun Seluas : 91 are
2. Tanah Perumahan Seluas : 65 are
3. Tanah Sawah Seluas : 216,5 are

Para penggugat tidak setuju dengan penyerahan dan atau pembagian yang telah dilakukan oleh H.P. Rajeng karena tidak sesuai dengan pembagian berdasarkan Hukum Kewarisan Islam.⁸ Hal itulah yang menyebabkan harta warisan pewaris disengketakan pada tahun 2006.

Penggugat tiga orang, yakni terdiri dari anak-anak kandung pewaris. Tergugat dua orang, masing-masing satu orang anak kandung pewaris dan satu orang cucu kandung pewaris, turut tergugat adalah satu orang anak kandung pewaris, selebihnya yang sebelas orang adalah cucu pewaris dan satu orang anak istri dari anak kandung pewaris yang telah meninggal dunia. Dari posisi kasus diatas maka ditarik sebuah fakta pewaris sebagai berikut:

- a. Setelah pewaris meninggal dunia, penguasaan harta warisan beralih kepada jandanya (ahli waris karena hubungan perkawinan) dan dikuasai kurang lebih 53 Tahun.

⁸Pemabagian Harta Warisan yang dilakukan oleh istri (Janda) pewaris yang menguasai harta warisan selama lima puluh tahun disamping tidak berdasarkan hukum kewarisan Islam, juga tidak disetujui oleh semua ahli waris pewaris, sehingga dengan alasan tidak semua ahli waris setuju atas pembagian yang dilakukan itu menjadi penyebab disengketakan ke Pengadilan Agama.

- b. Sebelum meninggal dunia, janda pewaris menyerahkan/ membagi kan harta warisan kepada anak-anaknya menurut kemauannya sendiri.
- c. Pembagian itu tidak disetujui sebagian ahli waris karena tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.
- d. Tujuh tahun setelah Janda pewaris meninggal dunia, anak-anaknya yang tidak setuju atas pembagian tersebut mengajukan sengketa harta warisan ini ke Pengadilan Agama.
- e. Permasalahan utama Hingga terjadinya sengketa karena harta warisan tidak segera dibagi setelah pewaris meninggal dunia.
- f. Sengketa terjadi setelah 60 Tahun pewaris meninggal dunia.
- g. Pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah anak-anak kandung pewaris, cucu-cucunya dan satu orang menantu tuanya.

Buku Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq dalam buku ini menjelaskan bahwa masing-masing dari ahli waris itu memiliki bagian masing-masing sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat menguasai harta warisan secara pribadi atau secara bersama, karena dapat menimbulkan konflik diantara sesama ahli waris dan merenggangkan tali persaudaraan diantara ahli waris, sebab dalam agama Islam itu mencintai perdamaian dan selalu dianjurkan untuk menjaga tali persaudaraan antar sesama keluarga.⁹

Buku *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaian* Oleh Drs. H. Adnan Qohar, SH., Drs. H.A Choiri, SH, MH., dan Dr. H.M. Muchlis KS., M.Ag. mengatakan bahwa Hukum Islam Sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia ini, substansinya mencakup

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Buku 12-13-14* (Bandung; PT. Alma'arif,1987),h.252.

seluruh aspek kehidupan Manusia, dan sistem hukumnya mempunyai cirri khusus yang berbeda dengan sistem hukum lain yang berlaku di dunia ini.

Dalam Buku *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* oleh Tim El-Madani sebab-sebab pemabgian warisan bergantung pada tiga hal, yaitu kekerabatan, hubungan suami istri dan kekuasaan (*al-wala*). Adapun kekerabatan atau nasab hakiki, Imam Hanafi menyebutkan Ar-Rahim, maka yang dimaksudkan adalah kekerabatan Hakiki. Yakni setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup cabang-cabang (keturunan) si mayyit dan asal usulnya juga anak keturunan dari asal usul mayyit. Baik warisan itu dengan bagian saja seperti ibu atau dengan ashabah saja seperti saudara laki-laki, atau karena rahim seperti *zawil arhaam*.¹⁰

Adapun hubungan suami istri atau nikah yang sah, yang dimaksudkan adalah akad yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak, ini mencakup suami dan istri. Jika salah seorang dari suami istri meninggal sebelum persetubuhan maka bisa mewarisi, karena keumuman dari makna ayat wasian antara suami istri. Juga karena Nabi Muhammad saw., memutuskan kasus Barwa' Binti Waasyiq dia mendapat warisan suaminya telah meninggal sebelum menyetubuhnya. Istri mewarisi suaminya jika dia masih dalam masa iddah talak *raj'i* sebab hubungan suami istri dalam talak *raj'i* masih eksis selama dalam masa iddah.¹¹

Adapun perempuan yang ditalak *ba'in* maka dia tidak bisa mewarisi meskipun pada masa iddah, jika suaminya mentalaknya dalam keadaan suaminya sakit keras karena menghindari pewarisan darinya inilah yang disebut dengan talak

¹⁰Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Harta Waris dan Pengaturan Wakaf* (cet I: Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2014), h.9.

¹¹Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Harta Warisan dan Pengaturan Wakaf*, h.40.

penghindaran, maka istri mewarisinya. menurut Imam Hanafi jika si suami meninggal, selama iddahnya belum habis, sebagai sikap terhadap si suami agar membatalkan maksudnya.¹²

Dalam *Buku Hukum Kewarisan suatu Analisis Komperatif pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* oleh Drs. H. Amin Husain Nasution, M.A. mengatakan bahwa dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “Tirikah/Tirkah”. Tarikah/Tirkah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.¹³

Dalam Buku Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan Bijak memahami masalah Hukum Waris oleh Devita Purnamasari adalah konsep dasar pewarisan sesuai kompilasi Hukum Islam seperti halnya ketentuan umum dalam waris Barat, Peralihan, hak atas harta warisan baru terjadi pada saat pewaris meninggal dunia.¹⁴

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Membahas dan mengkaji bagaimana Hukum Islam memandang kasus penundaan pembagian harta warisan.
- b. Membahas dan mengkaji dampak akibat yang timbul akibat terjadi kasus penundaan pembagian harta warisan.

¹²Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Harta Warisan dan Pengaturan Wakaf*,h.40

¹³Amin Husein Nasution,*Hukum Kewarisan suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. (Cet. II; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada,2012),h.57.

¹⁴Irma Devita Purnama Sari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami masalah Hukum Waris* (Cet.I; PT. Mizan Pustaka, 2014),h.32.

- c. Membahas dan mengkaji serta memberikan penjelasan tentang bagaimana cara penyelesaian kasus penundaan pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum kewarisan Islam pada Khususnya, demi mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan diantara keluarga yang menjadi ahli waris,
- b. Kegunaan praktis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah untuk membangun masyarakat, bangsa, Negara dan Agama.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Teologi Normatif Pembagian Harta Warisan

1. Berdasarkan Al-Qur'an

a. QS. An-Nisa/4:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan parah kerabat, dan bagi wanita ada bagian dari harta-harta peninggalan ibu-bapak dan para kerabat, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.¹⁸

1. Azbabul Nuzul

Dalam riwayat ini dikemukakan bahwa kebiasaan kaum jahilia pada masa itu tidak memberikan harta warisan kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Ansar bernama Aus bin Tsabit wafat dan meninggalkan dua orang putri serta seorang anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua anak pamannya, yaitu Khalid dan Arfathah yang menjadi asabat.¹⁹ Mereka kemudian mengambil semua harta peninggalannya, maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah saw, untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah saw, bersabda:” saya tidak tahu apa yang harus saya katakan,” maka turunlah ayat Q.S An-Nisa/4:7

¹⁸Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Solo: Tiga Serangkai),h.78.

¹⁹Ahli waris yang berhubungan darah langsung dengan yang meninggal; ahli waris yang berhubungan dengan yang meninggal secara kerabat dari pihak bapak; ahli waris yang hanya memperoleh sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h.89)

sebagai penjelasan tentang hukum waris dalam Islam.²⁰ (diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dan Ibnu Hibban didalam kitab *al-fara'idi* (ilmu waris), dari Al-Kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu Abbas)

2. Tafsiran Ayat

Setelah ditetapkan hak-hak khusus bagi orang-orang yang lemah, yakni anak yatim dan mas kawin wanita, pada ayat ini (Q.S An-Nisa/4:7) dijelaskan hak lain yang harus ditunaikan, dan dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat sering kali diabaikan, yaitu hak-hak waris. Dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang sebelumnya memerintahkan untuk menyerahkan harta kepada anak-anak yatim, wanita, dan kaum lemah, seakan-akan ada yang bertanya: “ Dari manakah wanita dan anak-anak itu memperoleh harta ?” maka, dapat diinformasikan dan ditekankan bahwa disini bagi anak laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabatnya, ada hak berupa bagian tertentu yang akan diatur oleh Allah swt, setelah turunya ayat tentang ketentuan umum ini dari harta peninggalan ibu-bapak dan para kerabatnya.²¹

Iniilah yang menjadi prinsip umum yang diberikan Agama Islam kepada Kaum wanita sejak dahulu, yaitu hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki dilihat dari satu segi dan sebagaimana diberikan pula hak kepada anak-anak kecil yang dirampas hak-haknya dan dianiaya oleh kaum jahilia, hal ini dilakukan oleh kaum jahilia sebab mereka melihat seseorang dari nilai kerja dan aktivitasnya dalam berperang dan memproduksi. Maka, Islam dengan manhaj *Rabbani-Nya*, pertama-tama melihat manusia dari nilai kemanusiaannya, yang merupakan nilai asasi yang tidak dapat

²⁰K.H.Q Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* (Cet: VI; Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2004),h.128.

²¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbahpesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Cet: V: Ciputat, Penerbit Lentera Hati, 2012),h.423

lepas darinya dalam kondisi apapun, kemudian setelah itu melihat tugas-tugasnya riilnya dalam kalangan keluarga dan masyarakat.²²

Ketika mereka tidak memberikan harta peninggalan kepada wanita dengan alasan bahwa mereka tidak ikut berperang, secara khusus dan mandiri ayat ini menekankan bahwa bagi wanita, baik dewasa maupun anak-anak, ada juga hak berupa bagian tertentu. Agar tidak terjadi kerancuan menyangkut sumber hak mereka itu, ditekankan bahwa hak itu sama sumbernya dari perolehan lelaki, yakni dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat mereka. lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa, baik harta peninggalan itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh yang Maha Agung Allah swt.²³

b. QS. An-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahannya:

Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;

²²Sayyid Qutubh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Surah Ali-Imran-An-Nisa Jilid 2* (Cet I:Depok; Gema Insani,2001),h.286.

²³M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbahpesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an Volume 2*. h.423.

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁴

1. Asbabun Nuzul

Dalam riwayat ini dikemukakan bahwa Rasulullah saw, disertai Abu Bakar berjalan kaki menegok Jabir bin ' Abdillah sewaktu sakit karena di kampung Bani Salamah, ketika itu didapatkannya dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Rasulullah meminta air untuk berwudhu dan memercikkan air kepadanya, sehingga ia sadar. Kemudian Jabir berkata: “ apa yang tuan perintahkan kepadaku tentang harta bendaku?” maka turunlah ayat ini (Q.S An-Nisa/ 4:11) sebagai pedoman pemabagian harta warisan. (diriwayatkan oleh Imam yang enam, yang bersumber dari Jabir bin 'Abdillah).²⁵

2. Tafsiran Ayat

Pada ayat yang lalu Q.S An-Nisa/ 4:7 merupakan pendahuluan tentang ketentuan untuk memberikan kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka. Juga menegaskan bahwa anak hak untuk lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu-bapak dan kerabat mereka yang akan diatur diatur oleh Allah swt, maka pada ayat ini memerincikan tentang ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa Allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan ataupun lelaki, dewasa ataupun anak-anak, yaitu: bagian seorang anak lelaki dari anak-anak kamu, kalau bersamanya

²⁴Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,h.78.

²⁵K.H.Q Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*

ada anak-anak perempuan, dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama baginya untuk memperoleh warisan,

Setelah mendahulukan tentang hak-hak anak karena pada umumnya mereka lebih lemah dari orangtua, kini dijelaskan hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak.

Firman-Nya: (*لِلذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِي*) *lidzakari mitslu hazhzi al-untsayain*/bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Karena, dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran untuk bagian anak lelaki, itu berarti, bahwa sejak semula seakan-akan sebelum ditetapkan hak anak lelaki-hak anak perempuan telah terlebih dahulu ada. Bukankah jika kita mengukur sesuatu, terlebih dahulu anda harus memiliki alat ukur, baru kemudian menetapkan kadar ukuran sesuatu itu ? penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan bahwa anak perempuan memperoleh hak warisan, bukan seperti yang diberlakukan pada masa Jahiliah.

Pemilihan kata (*ذَكَرٌ*) *dzakar* yang diterjemahkan diatas dengan anak lelaki, dan bukan *rajul* yang berarti lelaki, untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadikan faktor penghalang bagi penerimaan warisan karena kata *dzakar* dari segi bahasa berarti jantan, baik dewasa maupun anak-anak, binatang maupun manusia. Sedangkan kata (*أُنثَى*) *untsayain* yang diterjemahkan dua anak perempuan. Bentuk tunggalnya adalah (*أُنْثَى*) *untsa* yang berarti betina/ perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, binatang atau manusia.

Firman-Nya: *Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi*

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; penggalan ketentuan pembagian ini bukan berarti sikap pilih kasih berdasarkan jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi, ketentuan ini justru menunjukkan keseimbangan dan keadilan, karena berbedanya beban tanggung jawab antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga dan dalam sistem sosial Islam, pasalnya seorang laki-laki menikah dengan wanita dan diberikan tanggung jawab mengenai kehidupan keluarga dan anak-anaknya dalam semua hal, sementara istri hanya menyertainya saja dan terlepas dari beban tanggung jawab itu.²⁶

Pernyataan yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui apakah *orang tua atau anak-anak yang lebih dekat manfaatnya*, setelah menentukan perincian hukum waris menunjukkan bahwa nalar manusia tidak akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik bila kepadanya diserahkan wewenang atau kebijaksanaan untuk menetapkan bagian-bagian warisan. Hal Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa ada turunan-turunan agama yang bersifat (معقول المني) *ma'qul al-ma'na/ dapat dijangkau oleh nalar* dan ada juga yang (غير معقول المني) *ghair ma'qul al-ma'na / tidak dapat dijangkau oleh nalar*. Kedua hal ini didasarkan pada fitrah manusia, yakni bila fitrah manusia dalam hal yang berkaitan dengan materi petunjuknya tidak akan mengalami perubahan lagi atau kemampuannya akan mengantarkan mereka sampai kepada petunjuk yang dibutuhkannya, dalam kedua hal ini, Al-Qur'an menghadirkan petunjuk terperinci.²⁷

²⁶Sayyid Qutubh, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* dibawah Naungan Al-Qur'an Surah Al-Imran-An-Nisa Jilid 2, h.290.

²⁷M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* volume 2, h.437.

c. QS. An-Nisa/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁸

1. Asbabun Nuzul

Dalam riwayat ini dikemukakan bahwa Rasulullah saw, disertai Abu Bakar berjalan kaki menengok Jabir bin ‘Abdillah sewaktu sakit karena di kampung Bani Salamah. Ketika didapatkannya tidak sadarkan diri, kemudian Rasulullah saw, meminta air untuk berwudhu dan memercikkan air kepadanya, sehingga ia sadar, lalu Jabir berkata: “ apa yang Rasulullah perintahkan kepadaku tentang harta bendaku ?”

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.79.

maka turunklah ayat ini (Q.S An-Nisa/ 12) sebagai pedoman pembagian harta waris.²⁹
(diriwayatkan oleh imam yang enam, yang bersumber dari Jabir bin ‘Abdillah)

2. Tafsiran Ayat

Setelah membahas tentang bagian anak dan ibu bapak pada ayat 11 maka pada ayat 12 ini menjelaskan bagian mereka yang berhubungan yang berdasarkan keturunan, di sini dijelaskan pertama adalah suami, karena gen suami yang menentukan jenis kelamin anak, baru setelah itu istri menerima benih anak dari suami. Setelah selesai penjelasan tentang ahli waris yang tanpa perantara lagi memiliki hubungan pernikahan, ayat 12 ini ditutup dengan penjelasan tentang ahli waris yang dengan perantara yaitu *kalalah*, *kalalah* adalah *tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak*.

Nash-nash ini begiti jelas dan cermat, suami mendapatkan separuh harta peninggalan istrinya jika si Istri meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak laki-laki atau wanita, adapun jika ditinggalkan anak seorang ataupun lebih maka Duda mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan istrinya, anak-anaknyalah yang menjadikan berkurangnya bagian Duda.³⁰

Setelah menjelaskan bagian suami, kini dijelaskan bagian isteri, yaitu *para isteri*, baik suami bermonogami atau berpoligami, yakni baik isteri suami yang meninggal itu seorang diri maupun empat orang, maka kamu semua *memeroleh seperempat harta kamu*, istri mewarisi seperempat peninggalan suami jika suami

²⁹K.H.Q.Shaleh, H.A.A. Dahlan,dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*,h.128

³⁰Sayyid Qutubh, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Surah An-Nisa* Jilid 2,h.290.

meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak laki-laki ataupun perempuan, seorang ataupun lebih.³¹

wahai suami, *tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak* dari salah seorang diantara isteri-isteri kamu itu, yang seperempat itu dibagi secara rata tanpa membedakan isteri pertama dengan yang lain. *Jika kamu mempunyai anak kamu mempunyai anak* yang tidak terhalangi oleh apapun untuk mendapat warisan, *maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan* sebagaimana ketentuan pembagian yang disebut bila mereka mendapat seperempat. Warisan yang kamu tinggalkan baru dapat dibagikan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu, wahai para suami, buat atau *sesudah dibayar utang-utang kamu*.³²

d. Surah An-Nisa ayat 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.³³

1. Asbabun Nuzul

Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa Dawud bin al-Hushain membacakan ayat وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ (...dan jika ada orang-orang yang kamu telah mengadakan

³¹Sayyid Qutubh, Tafsir Fi Zilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Surah Al-Imran-An-Nisa Jilid 2,h.293.

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan dan Keseraisan Al-Qur'an* vokume 2 h.440.

³³Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 83.

perjanjian dengan sumpah kamu...) kepada Ummu sa'd binti ar-Rabi' yang tinggal di rumah Abu Bakr, akan tetapi Ummu Sa'd berkata :” salah, bukan demikian! Hendaknya kamu baca, وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ (... dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka...) karena ayat ini (Q.S An-Nisa/4:33) turun berkenaan dengan peristiwa yang dilakukan oleh Abu Bakr yang bersumpah bahwa ia tidak akan memberikan warisan kepada anaknya yang tidak mau masuk Islam, dan setelah anaknya masuk Islam, maka diperintahkan untuk diberi warisan sesuai dengan ayat tersebut.³⁴ (diriwayatkan oleh Abu Dawud didalam sunan-Nya dari Ibnu Ishaq, yang bersumber dari Dawud bin al-Hushain)

2. Tafsiran Ayat

pada ayat ini diingatkan bahwa setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, maka dijadikan pewaris-pewarisnya, seperti anak, istri dan orangtua, apabila ada orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka mereka harus diberikan bagiannya sesuai dengan kesepakatan kamu sebelumnya.³⁵

e. Surah An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya

³⁴K.H.Q.Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Ayat Al-Qur'an*, h.128

³⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an volume 2*, h.507

yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

1. Asbabun Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah saw, menengok Jabir yang sedang sakit, Jabir kemudian berkata: “ Ya Rasulullah! Bolehkah saya berwasiat memberikan sepertiga hartaku untuk saudara-saudaraku yang perempuan.” Rasulullah saw, kemudian bersabda:”baik” ia berkata lagi: “ kalau setengahnya?” beliau menjawab:”baik pula”. Kemudian Rasulullah pulang, dan tidak lama kemudian, beliau datang lagi ke rumah Jabir dan bersabda: “aku kira kamu tidak akan mati karena penyakitmu ini, dan Allah swt, telah menurunkan ayat kepadaku, yang menjelaskan pembagian waris bagi saudara-saudara perempuan, yaitu sebesar duapertiga.³⁶ (diriwayatkan oleh An-Nasai dari Abuz Zubair yang bersumber dari Jabir).

2. Tafsiran ayat

Pada ayat ini tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya yaitu Q.S An-Nisa/4:175, tetapi ayat ini ditempatkan diakhir karena ayat ini turun setelah turunnya ayatt-ayat yang lalu dan juga ada hubungan persamaan uraian tentang *kalalah* yang disebutkan pada awal surah ini yaitu ayat 12.

Lengkaplah bagian terakhir masalah kewarisan *kalalah*, ayat kewarisan dan sekaligus surat terakhir ini diakhiri dengan komentar qur’ani dengan mengembalikan segala urusan

³⁶K.H.Q.Shaleh, H.A.A. Dahlan,dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*,h.180.

kepada Allah swt, dan menghubungkan antara pengaturan hak dan kewajiban harta dan nonharta dengan apa yang disyariatkan Allah” *Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*” (QS. An-Nisa/4:176)³⁷

Al-Biqā’I menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lalu dengan menyatakan bahwa Allah swt., tidak menyebut pada ayat yang lalu sanksi atas kelompok pembangkang dan menempatkan pada tempatnya salah satu hukum kewarisan awal surah dan salah satu tujuan utama surah ini. Allah menguraikan hukum ini tanpa menggunakan huruf (و) *wauw/ dan* untuk menunjukkan betapa eratny hubungan antara ayat ini dan ayat yang lalu.

Diatas, terbaca bahwa *kalalah* adalah seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan ayah. Memang, teks ayat hanya menyebutkan *tidak mempunyai anak*, tetapi pemahaman mayoritas Ulama kalau enggan berkata *ijma’* (kesepakatan) semula ulama menambahkan pula “ayah”. seandainya salah seorang dari orang tua masih hidup, tentu saja bagiannya disebut dalam rangkaian ayat ini, tetapi ternyata disini tidak disinggung sedikit pun. Dengan demikian, *kalalah* adalah yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak. Ini dikuatkan pula dengan sebab turunnya ayat ini.³⁸

Inilah yang menjadi inti yang meliputi segala sesuatu tentang urusan warisan, nonwaris, hubungan keluarga dan masyarakat, hukum dan peraturan-peraturan, tinggal manusia apakah mereka mengikuti keterangan (hukum) Allah dalam semua urusan atautkah memilih kesesatan, hanya ada dua jalan bagi kehidupan manusia,

³⁷Sayyid Qutubh, *Tafsir Fi Zilalil Qur’an dibawah Naungan Al-Qur’an Surat An-Nisa-Al-Maidah* Jilid 3,h.152-153.

³⁸M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an volume 2*,h. 840.

tidak ada yang ketiga, yaitu jalan keterangan Allah swt yang berupa petunjuk dan jalan lain yang berupa kesesatan. Maha Besar Allah dengan Segala Firmannya.³⁹

2. Berdasarkan Hadis-Hadis Nabi Muhammad saw. Tentang Kewarisan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَقُّو الْفَرِائِضَ بَأْ هَلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ^{٤٠}

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumata berkata, “ Rasulullah saw, Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat” (Muttafaq Alaihi).

Penjelasan Hadist

“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya (yaitu 6 bagian yang diterangkan dalam Al-Qur’an lengkap dengan yang berhak menerimanya) selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat (ada perbedaan diantara ulama tentang faedah penyebutan laki-laki dengan sifat kelaki-lakian dan kekerabatan; pengulangan sifat itu sebagai bentuk penguat (ta’kid). Banyak sekali penjelasan tentang hal itu, akan tetapi faedahnya sedikit sekali).⁴¹

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ^{٤٢}

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Muhammad saw, bersabda, “ Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. “ (Muttafaq Alaihi)

³⁹Sayyid Qutubh. *Tafsir Fi Zilalil Qur’an dibawah Naungan Al-Qur’an surat An-Nisa-Al-Maidah* Jilid 3,h.153.

⁴⁰(صحيح) Hadist ini Shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1287).

⁴¹Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2 (Cet, I; Jakarta: Darus Sunnah,2007),h.570.

⁴²(صحيح) Hadist ini Shahih, Al-Bukhari (4283), Muslim (1614).

Penjelasan Hadis

Mu'adz berhujjah, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw, bersabda, “*Islam itu bertambah dan tidak berkurang*”⁴³ diriwayatkan oleh Abu Dawud dan di Shahihkan Al-Hakim.

Musaddad meriwayatkan bahwa dia pernah melihat dua orang Muslim dan Seorang Yahudi yang berselisih minta penyelesaian kepada *Mu'adz* tentang masalah warisan sepeninggal bapak mereka yang beragama Yahudi; sebab semua warisan itu diambil oleh anaknya yang beragama yahudi, lalu *Mu'adz* menghakimi dengan memberikan warisan kepada yang muslim.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan Hadist dari Abdullah bin Ma'qal berkata, “*sungguh aku tidak pernah pernah melihat keputusan tentang warisan yang lebih bagus dari apa yang telah dilakukan oleh Mu'awiyah. Ia memberikan hak warisan kepada yang muslim walaupun yang meninggal adalah seorang ahli kitab, tetapi mereka tidak bisa mewarisi dari kami yang muslim; sebagaimana kita dihalalkan menikahi wanita ahli kitab tetapi tidak sebaliknya.*”⁴⁴ Jumhir ulama membantah semua hujjah tersebut dengan mengatakan, bahwa hadist yang disepakati keshahiannya menegaskan tentang larangan mewarisi harta waris non muslim. Sementara hadist yang bersumber dari Mu'adz bukan merupakan dalil yang mengistimewakan seorang muslim atas yang lainnya, melainkan sebagai pemberitahuan bahwa agama Islam lebih utama daripada agama lainnya. Karena Islam adalah agama yang senantiasa bertambah dan tidak berkurang.⁴⁵

⁴³Hadist ini Dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (2912,2913).

⁴⁴Al-Mushannaf (6/284-285)

⁴⁵Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, h.571-572.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ, وَبِنْتِ ابْنٍ, وَأُخْتٍ. قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَتِهِ الْبُصْفُ, وَلِابْنَتِهِ الْإِبْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁶

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu tentang bagian warisan anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Rasulullah saw, menetapkan untuk anak perempuan mendapatkan setengah, cucu perempuan seperenam sebagai penyempurna (bagian) dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan. (H.R. Al-Bukhari).

Penjelasan Hadis

Hadist diatas menjelaskan, bahwa bila berkumpul antara saudara perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki simayit, maka saudara perempuan menjadi ashabah. Hal ini sudah disepakati apabila saudara-saudara perempuan berkumpul dengan anak-anak perempuan, maka kedudukannya menjadi ashabah. Sedangkan Abu Musa berfatwa, bahwa saudara perempuan mendapatkan bagian setengah. Lalu Abu Musa menyuruh si penanya tersebut untuk bertanya kepada Ibnu Mas'ud maka Mas'ud menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah perkara seperti itu. Lalu Abu Musa berkomentar, “Janganlah kalian bertanya kepadaku, selagi sang alim (*Al-habr*) ini berada diantara kalian.”

Abu Ubaid menerangkan, makna *al-habr* seorang alim yang pintar memberikan jawaban solutif. Ada juga yang mengatakan, dijuluki dengan demikian karena banyaknya ilmu yang diwariskan kepada generasi setelahnya.⁴⁷

⁴⁶(صحيح) Hadist ini Shahih, Al-Bukhari (6736)

⁴⁷Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, h.573.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَوَارِثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ ،^{٤٨} وَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَا مَةَ^{٤٩} . وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَا مَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ .^{٥٠}

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah saw, bersabda, “ tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan Agama.” (H.R. Ahmad, Al-Arba’ah kecuali At-Tirmidzi.(H.R Ahmad, Al-Arba’ah kecuali At- Tirmidzi. H.R Al-Hakim dengan lafadz dari Usamah. H.R An-Nasai meriwayatkan dari Usamah dengan Lafadz seperti ini).

Penjelasan Hadist :

Hadist diatas menunjukkan bahwa tidak bisa saling mewarisi antara penganut agama yang berbeda dengan orang kafir, atau antara Islam dengan dua agama yang berbeda adalah seperti agama Islam dengan agama kafir (Non-Islam), maka hal ini sejalan dengan hadist Nabi yang menyatakan,” *Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir.*” Mereka menambahkan, adapun selain agama Islam (kafir) mereka bisa saling mewarisi walaupun berbeda-beda; berdasarkan ketetapan Islam.⁵¹

وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدُ يَكْرِبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَالُ وَارِثٌ مِنْ لَا وَارِثَ لَهُ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ : وَحَسَنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حَبَّانَ .^{٥٢}

Artinya:

Dari Al-Miqdam bin Ma’di karib berkata, “ Rasulullah saw, bersabda, “ Paman (dari pihak ibu) menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris.” (HR. Ahmad

⁴⁸(حسن صحيح) Hadis ini Hasan shahih, *Shahih Abi Daud* (2911)

⁴⁹Al-Hakim (4/384).

⁵⁰An-Nasa’I dalam kitab Al-Kubra (4/82)

⁵¹Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, h.573.

⁵²(حسن صحيح) Hadist ini hasan Shahih, *Shahih Abi Dawud* (2899,2900,2901)

dan Al-Arba'ah kecuali At-Tirmidzi. Hadist ini derajatnya hasan menurut Abu Zar'ah Ar-Razi, dan Shahih menurut Al-Hakim dan Ibnu Hibban).

Penjelasan Hadist:

Hadist diatas menunjukkan bahwa paman (dari pihak ibu) mendapatkan harta waris apabila tidak ada ahli waris si mayit, baik dari pihak ashabah maupun ashabul furudh (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu), dan paman (dari pihak ibu) termaksud dzawil arham (pertalian kekerabatan karena kesatuan rahim).⁵³

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُو دُ وَرِثَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانٍ)^{٥٤}

Artinya:

Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah saw, bersabda “ Apabila anak yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris.” (HR. Abu Dawud dan di Shahihkan oleh Ibnu Hibban).

Penjelasan Hadist:

Ibnu Al-Atsir berkata, “bayi yang lahir dikatakan hidup bila dia menangis.” Tangisan merupakan bentuk kinayah bahwa ia telah lahir dalam keadaan hidup, atau dia tidak menangis tapi terdapat tanda-tanda kehidupan padanya.⁵⁵

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْقَاتِلِ تِلْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْزٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالِدَا رَفِطْنِي , وَقَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . وَ أَعْلَهُ النَّسَائِيُّ , وَ الصَّوَابُ وَقَفُّهُ عَلَى عَمْرِو .^{٥٦}

⁵³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, h.576.

⁵⁴ Ini adalah lafadz hadits dari riwayat Abu Hurairah sebagaimana terdapat dalam Shahih Abi Dawud (2920), dan Hadis Jabir ini dikeluarkan At-Tirmidzi (1032).

⁵⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, h.579.

⁵⁶ Kasyf Al-Astar (1390).

Artinya:

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw, bersabda, "pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang dibunuh." (H.R. An-Nasa'I dan Ad-Daraquthni, dan dikuatkan Ibnu Abdil Bar. Hadist ini ma'lul menurut An-Nasa'I dan sebenarnya hadist ini mauquf pada amar).

Penjelasan Hadist

Hadis diatas mempunyai banyak *syahid* (hadis pendukung) sehingga tetap diamalkan sesuai dengan pengertiannya secara umum.

Imam Syafi'I, Abu Hanifah dan pengikutnya serta kebanyakan ulama lainnya berpendapat bahwa si pembunuh tidak mendapatkan warisan dan juga bagian dari diyat, dengan tidak membedakan antara pembunuhan sengaja atau tidak. Sementara Al-Hadawiyah dan Imam Malik berpendapat: jika pembunuhan terjadi tidak sengaja; maka dia masih mendapatkan warisan tapi tidak mendapatkan bagian diyat. Sedangkan tidak ada dalil yang menetapkan hukuman berbeda bagi pelaku pembunuhan dari aspek sebab-musababnya.⁵⁷

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَالِدَةُ فَهُوَ لِعَصْبَتِهِ مَنْ كَانَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ أَبُو الْمَدِينِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.⁵⁸

Artinya:

Dari Umar bin Al-Khaththab r.a. berkata, " Aku mendengar Rasulullah saw, bersabda, " apa yang diperoleh oleh ayah atau anak adalah untuk ashabah, siapapun dia.

⁵⁷Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*,h.580.

⁵⁸(حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (2917)

Penjelasan Hadist:

Hadist diatas adalah dalil yang menunjukkan bahwa *wala'* tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya, namun permasalahan ini masih diperselishkan oleh para ulama apakah diwariskan atau tidak. Faedah perbedaan ulama akan terlihat bila ada seorang yang memerdekakan budak, lalu orang itu wafat dengan meninggalkan dua orang saudara atau dua orang anak, kemudian salah satu saudaranya wafat dengan meninggalkan seorang anak. Bagi yang berpendapat bahwa *wala'* (perwalian nasab) diwariskan; maka dibagikan anantara anak laki dan cucu anak laki atau anak dari saudara yang wafat, namun bagi yang berpendapat bahwa itu tidak diwariskan; semua itu menjadi hak mutlak anaknya saja.⁵⁹

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171 huruf a).

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171 huruf b).

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171, huruf c).

⁵⁹Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*,h.583.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.(Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171, huruf d).

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (Kompilasi Hukum Islam, bab 1, pasal 171, huruf d).⁶⁰

B. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Fara'idh' bentuk jama' *faridhah* yang lazim diartikan sebagai suatu kewajiban, kata *faridhah* yang berasal dari akar kata *faradha* pada mulanya berarti *al-qath'u* yang berarti pemutusan, atau pemotongan. Kata *faradha* di dalam Al-Qur'an digunakan untuk arti ketentuan; umumnya terdapat pada ayat-ayat yang membicarakan ketentuan membayar mahar istri, seperti didalam Q.S Al-Baqarah/2: 236 dan Q.S An-Nisa/ 4: 24 atau membicarakan kewarisan seperti pada Q.S An-Nisa/4 : 11, dan kewajiban seperti pada Q.S At-Taubah/9 : 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.⁶¹

Ada banyak istilah menyangkut ketentuan agama berkenaan dengan hal ihwal peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, baik dalam literatur yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Dalam literatur yang berbahasa Indonesia dijumpai istilah hukum warisan, hukum waris,

⁶⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta,2004),h.195.

⁶¹Perpustakaan Nasional, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jilid 1 (Cet.I; Jakarta: Lentera hati,2007),h.217.

hukum harta pusaka, dan hukum kewarisan. Sedangkan dalam literatur yang berbahasa Arab dijumpai istilah *mawarist* (مواريث), *tirkah* (تركة), *warits* (وارث), dan *faraidh* (فرائض). Perbedaan dalam penyebutan istilah tersebut tergantung dari sisi mana titik pandangan dalam pembahasannya. Bila titik pandang pembahasannya pada orang yang mati, maka dalam bahasa Indonesia disebut hukum waris, atau dalam bahasa Arab disebut *فقه الوارث*. Bila yang akan dijadikan titik pandang pembahasannya adalah harta yang akan beralih kepada ahli waris, maka ia disebut hukum warisan atau hukum harta pusaka, yang dalam bahasa Arabnya disebut *ميراث* jamaknya *مواريث* atau *تركة*. Bila yang dijadikan titik pandang pembahasan adalah bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, maka dalam bahasa Arab disebut *فرائض* *Faraidh* (ا ئضفر) inilah istilah yang lazim digunakan dalam literatur fiqh. Dalam istilah fiqh Islam, kewarisan (الفرائض) kata tunggalnya (الميراث) lazim juga disebut dengan *fara'idh* (ا ئضفر) jamak dari (فريضة).

M.Tahir Azhari dalam bukunya karakteristik Hukum Kewarisan Islam memberikan pernyataan, bahwa “ Hukum kewarisan Islam yang juga dikenal dengan *The Islamic Law Of Inheritance*, mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civil Law* ataupun *Common law*. ”

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, maka Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan ketentuan hukum bagi ummat Islam Indonesia. Dan pengertian hukum kewarisan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab fiqh, telah terangkum menjadi sebuah rumusan mengenai ketentuan pengertian hukum kewarisan Islam yang representative. Di

dalam pasal 171 huruf a KHI dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah:

Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁶²

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw, berupa ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadist-hadist Rasulullah saw, dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, ada yang secara tersirat dan ada yang kadang-kadang hanya berisi pokok-pokok saja. Dan yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat An-Nisa, disamping surat-surat lainnya sebagai pendukung.

a. Dasar Hukum Dari Ayat-ayat Al-Qur'an

QS. An-Nisa / 4 :7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

⁶²Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*,h. 195.

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁶³

QS. An-Nisa/4 : 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁶⁴

QS. An-Nisa/ 4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁶⁵

Surah An-Nisaa/ 4 : 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).⁶⁶

⁶³Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,h. 78.

⁶⁴Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,h.78

⁶⁵Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,h.78.

⁶⁶Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,h.78.

Surah An-Nisaa/4 : 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahny:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁶⁷

QS. An-Nisaa/4: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيهِهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.⁶⁸

QS. An-Nisaa / 4 :176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶⁹

⁶⁷Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h.78-79

⁶⁸Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan,h.83.

⁶⁹Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan,h.106

QS. Al-Azhab ayat 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

b. Dasar Hukum Dari Hadist Rasulullah saw.

Adapun Hadist-hadist yang menjelaskan tentang Hukum Kewarisan Islam.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَقُّو الْفَرِائِضَ بَأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁷⁰

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, “ Rasulullah saw, Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat” (Muttafaq Alaihi).

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁷¹

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Muhammad saw, bersabda, “ Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. “ (Muttafaq Alaihi)

⁷⁰(صحيح) Hadist ini Shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1287).

⁷¹(صحيح) Hadist ini Shahih, *Al-Bukhari* (4283), *Muslim* (1614).

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ, وَ بِنْتِ ابْنٍ, وَ أُخْتٍ. قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَتِهِ الْبُصْفُ, وَ لِابْنَتِهِ الْإِبْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ - وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)^{٧٢}.

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu tentang bagian warisan anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Rasulullah saw, menetapkan untuk anak perempuan mendapatkan setengah, cucu perempuan seperenam-sebagai penyempurna (bagian) dua pertiga-dan selebihnya adalah milik saudara perempuan. (H.R. Al-Bukhari).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ لَا بُرَيْدَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ^{٧٣}, وَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظٍ أُسَامَةَ^{٧٤}. وَ رَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ.^{٧٥}

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah saw, bersabda, “ tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan Agama.” (H.R. Ahmad, Al-Arba'ah kecuali At-Tirmidzi.(H.R Ahmad, Al-Arba'ah kecuali At- Tirmidzi. H.R Al-Hakim dengan lafadz dari Usamah. H.R An-Nasai meriwayatkan dari Usamah dengan Lafadz seperti ini).

وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدٍ يَكْرِبُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَالُ وَارِثٌ مِنْ لَا وَارِثَ لَهُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ: وَ حَسَنُهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حَبَّانٍ.^{٧٦}

Artinya:

Dari Al-Miqdam bin Ma'di karib berkata, “ Rasulullah saw, bersabda, “ Paman (dari pihak ibu) menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris.” (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali At-Tirmidzi. Hadist ini derajatnya hasan menurut Abu Zar'ah Ar-Razi, dan Shahih menurut Al-Hakim dan Ibnu Hibban).

⁷²(صحيح) Hadist ini Shahih, Al-Bukhari (6736)

⁷³(حسن صحيح) Hadis ini Hasan shahih, *Shahih Abi Daud* (2911)

⁷⁴Al-Hakim (4/384).

⁷⁵An-Nasa'I dalam kitab Al-Kubra (4/82)

⁷⁶(حسن صحيح) Hadist ini hasan Shahih, *Shahih Abi Dawud* (2899,2900,2901)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانٍ^{٧٧})

Artinya:

Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah saw, bersabda “ Apabila anak yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris.” (HR. Abu Dawud dan di Shahihkan oleh Ibnu Hibban).

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْقَاتِلِ تِلْكَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْإِسْلَامِيُّ وَفَقَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. وَأَعْلَاهُ النَّسَائِيُّ, وَالصَّوَابُ وَقَفُّهُ عَلَى عَمْرِو^{٧٨}.

Artinya:

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw, bersabda, ” pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang dibunuh.” (H.R. An-Nasa'I dan Ad-Daraquthni, dan dikuatkan Ibnu Abdil Bar. Hadist ini ma'lul menurut An-Nasa'I dan sebenarnya hadist ini mauquf pada amar).

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَالِدَةُ فَهُوَ لِعَصْبَتِهِ مَنْ كَانَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ^{٧٩}.

Artinya:

Dari Umar bin Al-Khaththab r.a. berkata, “ Aku mendengar Rasulullah saw, bersabda, ” apa yang diperoleh oleh ayah atau anak adalah untuk ashabah, siapapun dia.

⁷⁷Ini adalah lafadz hadits dari riwayat Abu Hurairah sebagaimana terdapat dalam Shahih Abi Dawud (2920), dan Hadis Jabir ini dikeluarkan At-Tirmidzi (1032).

⁷⁸Kasyf Al-Astar (1390).

⁷⁹(حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (2917)

c. Dasar Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Ijtihad

Selain Al-Qur'an dan Hadist, hukum kewarisan juga bersumber dari hasil ijtihad para ulama. Ijtihad ialah usaha seseorang dengan segenap kemampuan akalanya dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadist. Dr. Amir Syarifuddin menyimpulkan, bahwa :

Hasil ijtihad yang telah dirintis oleh para mujtahid terdahulu dalam hubungannya dengan hukum kewarisan pada dasarnya terdapat dua aliran, yaitu aliran Ahli Sunnah dan Aliran Syi'ah. Perbedaan pokok diantara keduanya ialah pada pemahaman terdapat kedudukan peempuan dalam hukum kewarisan. Adanya perbedaan itu menimbulkan yang nyata dalam susuna ahli waris dan cara pewarisannya. Dalam aliran Ahlu Sunnah terdapat kelompok Jumhur Ulama' dan kelompok Dzahiri. Perbedaan diantara keduanya ialah pada pemahaman terdapat garis hukum. Ulama Dzahiri memahami garis hukum dari lahirnya saja, sedangkan Jumhur Ulama memahami garis hukum tidak dapat dari lahiriyanya saja apabila ada keterangan dari hadist nabi saw, yang menghendaki demikian. Di kalangan Jumhur Ulama pun terdapat perbedaan, hanya saja tidak terlalu jauh berbeda.⁸⁰

Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan orang banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan duda atau janda

3. Asas-asas Kewarisan Hukum Islam

Asas-asas dalam Hukum Kewarisan Islam ini ditonjolkan agar dapat diketahui sampai sejauh mana spesifikasi Hukum Kewarisan Islam serta nilai keadilannya sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw, dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas , yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan produk akal manusia, akan tetapi karena sifatnya yang berbeda dalam jenisnya, hukum kewarisan

⁸⁰ Saifuddin Al-Amidi, Al-ihkam Fi Ushulil Ahkam IV, Muassasiah Al-Halabi (kairo,t,t),h.141.

Islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan bagian dari Agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim⁸¹.

Asas-asas yang dapat disarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, mengandung lima asas, yaitu:

a. Asas Ijbari

. Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Kata Ijbari sendiri secara bahasa mengandung arti paksaan (*compulsory*). Dijalankan asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah swt, tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan atau mengeluarkan ahli waris yang sah sesuai yang ditentukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11,12 dan 176. Asas Ijbari ini tidak berarti memberatkan ahli waris, seandainya pewaris mempunyai utang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkan, maka ahli waris tidak dibebankan untuk membayar semua utang pewaris tersebut, apabila ada ahli waris yang hendak membayar utang tersebut, pembayaran itu bukanlah merupakan suatu kewajiban, melainkan suatu dorongan moralitas / akhlak yang baik oleh ahli waris.⁸²

⁸¹Drs.H.Adnan Qohar, SH, Drs. H.A. Choiri, SH, MH, dan Dr.H.M.Muslich KS.,M.Ag, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaiannya*,h.54.

⁸²Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika,2011),h.23.

b. Asas Bilateral

Asas Bilateral dalam hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Secara prinsip asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.⁸³

c. Asas Individual

Hukum kewarisan Islam mengajarkan asas kewarisan secara Individual, dalam artian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara pribadi, yang dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya sendiri tanpa harus terikat dengan ahli waris yang lainnya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam jumlah tertentu kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima.⁸⁴

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu kata *al-'adlu* (العدل). Adapun hubungannya dengan kewarisan adalah kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaanya.

Sebagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan harta warisan. Secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surah

⁸³Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*,h.24.

⁸⁴Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*,h.28

An-Nisa/4:7 yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan bahwa mereka memperoleh warisan baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan.

Asas ini mengadung arti bahwa harus ada keseimbangan hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dan yang harus ditunaikan, laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh harta warisan, akan tetapi dalam hal jumlah yang diterima antara laki-laki dan perempuan berbeda yaitu laki-laki memperoleh dua sedangkan perempuan hanya mendapatkan satu, hal ini terjadi disebabkan laki-laki itu menanggung beban untuk membiayai anak dan istrinya, sedangkan perempuan memperoleh biaya dari laki-laki, karena hal inilah yang menjadi dasar keseimbangan antara jumlah yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁵

e. ***Asas Semata Akibat Kematian.***

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan dapat berlaku apabila telah terjadi kematian, pemilik harta telah meninggal kemudian barulah harta tersebut dapat beralih atau dipindahkan kekuasaan kepada orang lain atau ahli waris. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain (ahli waris) selama yang mempunyai harta masih hidup.

Pada asas ini menggambarkan bahwa Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat adanya kematian bukan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.

Prinsip ini memiliki kaitan yang erat dengan asas Ijbari, apabila seseorang telah memenuhi Syarat sebagai subjek hukum, maka pada hakikatnya ia dapat

⁸⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, h.29.

bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya, akan tetapi, kebebasan itu hanya untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia, meskipun demikian kebebasan seseorang untuk berwasiat tetap terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.⁸⁶

4. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan Islam

Menurut Sayyid Sabiq seseorang dapat mewarisi harta seseorang karena tiga sebab yaitu: sebab hubungan kerabat/ nasab, perkawinan, dan *wala'* (pemerdekaan budak), adapun dalam literatur lainnya disebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya kewarisan itu ada empat sebab.

- a. Perkawinan;
- b. Kekerabatan/nasab;
- c. *Wala'* (pemerdekaan Budak) dan;
- d. Hubungan sesama Islam.⁸⁷

a. Hubungan Kekerabatan (Nasab)

Salah satu hal yang dapat mengalihkan harta seseorang kepada orang lain adalah apabila orang tersebut yang memiliki harta telah meninggal. Peralihan harta tersebut dapat dipindahkan kepada orang lain karena memiliki hubungan kekerabatan (nasab) antara pewaris dan ahli waris.

Ditinjau berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dan yang diwarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu:

1. *Furu'* yaitu anak turunan (cabang) dari si mati;
2. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati;

⁸⁶Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*,h.29-31.

⁸⁷Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif Islam*, dalam Amir Syarifuddin,eds., *Hukum Kewarisan Islam*.h.72.

3. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya dengan tidak membedakan.⁸⁸

b. Hubungan Perkawinan

Selain hubungan berdasarkan atas hubungan kekerabatan atau nasab, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan)⁸⁹ dengan maksud bahwa suami menjadi ahli waris bagi istrinya meninggal dunia, dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya apabila suaminya meninggal dunia.

Sebab timbulnya hubungan kewarisan karena perkawinan didasarkan pada dua syarat, yaitu:

1. Perkawinan itu sah Menurut Syariat Islam

Perkawinan yang dimaksud adalah semua syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, antara kedua mempelai yang telah melangsung akad nikah yang sah. Terlepas dari telah berhubungan badan ataupun belum, Ketentuan ini berdasarkan pada keumuman ayat tentang waris dan hadis Rasulullah saw, dikutip dalam sebuah Hadis.

قَضَى لِبَرَوَاءِ بِنْتِ وَاسِقٍ بِأَمِيرَاتٍ وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَلَمْ يُفَرِّضْ لَهَا صَدَاقًا⁹⁰

⁸⁸Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif Islam*, dalam Fathurrahman, eds., *Ilmu Waris*, h.73.

⁸⁹Pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum, jika dipandang dari kaum itu (msl orang yang kawin dengan saudara atau kemanakan istri atau suami); hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan: adat; kerabat karena perkawinan.

⁹⁰Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif Islam*, h.73.

Artinya:

Telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wasiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum melakukan hubungan kelamin dan belum menetapkan maskawinannya.

Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa' dengan suaminya adalah sah dan menjadi sebab timbulnya kewarisan, suatu perkawinan dihukumi sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan pada telah terlaksanankan hubungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinannya, sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut Syariat Islam atau dinyatakan *fasid* (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris-mewarisi antara keduanya apabila salah satu dari mereka meninggal dunia.

2. Perkawinan Masih Utuh

Perkawinan yang dibangun tersebut masih utuh, tidak ada perceraian selama keduanya bersama saat salah satu pihak meninggal dunia. Termaksud dalam ketentuan ini apabila salah satu meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'i* dan perempuan masih dalam masa *iddah*. seorang perempuan yang sedang menjalani *iddah talak raj'i* masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan badan (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan badan telah berakhir dengan adanya perceraian.⁹¹

⁹¹Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif Islam*, h.74.

c. Hubungan Sebab Wala'

Hubungan sebab *wala'* adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul sebab membebaskan budak, meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah.

Saat ini hubungan *wala'* hanya terdapat dalam tataran wacana saja sebab hubungan *wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya, dengan demikian, pemilik budak yang tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap menjadi cakap. Namun pada zaman sekarang hubungan *wala'* karena memerdekakan budak itu sudah tidak berlaku lagi sebab saat ini sudah tidak adalagi budak yang akan dimerdekakan.⁹²

d. Hubungan Sesama Islam

Hubungan sesama Islam disini adalah apabila seseorang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang biasanya disebut *Baitul Maal* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak memiliki ahli waris itu akan diwariskan kepada ummat Islam.⁹³

5. Ahli Waris dan Bagiannya Masing-masing.

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menajadi ahli waris.

⁹²Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif Islam*,h.74.

⁹³Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif Islam*,h.75.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak bagian dari harta warisan si pewaris, yaitu:

- a. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan darah dengan pewaris;
- b. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan si pewaris;
- c. Pada saat si pewaris meninggal dunia, ia orang itu beragama Islam;
- d. Pada saat si pewaris meninggal dunia, orang itu tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selain itu, juga disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris. Hanya saja apabila dia mempunyai anak, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan ketentuan antara dia si pewaris tidak terhalang menurut hukum untuk dapat saling mewarisi, berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam hal ini termaksud pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastiannya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal itu juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa ahli waris ada yang ditetapkan secara khusus dan langsung oleh Allah swt., dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah saw, dalam haditsnya, dan ada yang ditemukan melalui ijtihad dengan meluaskan lafadz yang terdapat dalam nash hukum, dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari Al-Qur'an dan atau Hadist.

1. Ahli Waris yang di Tunjuk Dalam Al-Qur'an

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan dasar hukum kewarisan Islam, maka ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing ialah terdapat dalam surah An-Nisaa ayat 11,12 dan 176.

Dari ketiga ayat tersebut maka yang menjadi ahli waris adalah:

- a. Anak laki-laki dan anak perempuan;
- b. Ayah dan ibu;
- c. Duda atau Janda;
- d. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu;
- e. Saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung atau seayah.

2. Ahli waris yang di Tunjuk Dalam Hadist.

Ahli waris yang ditunjuk secara khusus dan langsung ditetapkan dalam hadist adalah kakek dan nenek. Kewarisan kakek disebutkan dalam hadist Nabi dari Umar Bin Hashain menurut riwayat Ahmad dan empat perawi hadis, sebagaimana dikutip dalam sebuah hadist :

عن عمر ان بن الحصين قال : ان رلا اتى النبي صلعم فقال : أن ابن ابني مات فما لي من ميرثه فقال لك السدس (رواه أبو داود)⁹⁴

Artinya:

Dari Umran Bin Hashain, ia berkata, : seorang laki-laki datang menghadap Nabi saw, lalu berkata, “sesungguhnya cucuku dari anak laki-lakiku telah meninggal dunia, maka berapakah hak bagianku dari harta peninggalannya ? Nabi saw menjawab : “ Untuk mu seperenam”.

Sedangkan kewarisan nenek dijelaskan dalam hadist Nabi saw, dari Qubaishah Bin Zueb, sebagai berikut:

عن قبيصة بن زو يب قال : جاءت الجدة الى أبي بكر الصديق تسأله ميرثهل قال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شي وما علمت لك في سنة رسول الله صلعم شي فارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلعم فأعطاها السدس فقال أبو بكر : هل معك غيرك فقام محمد بن مسامة الأنصاري فقال مثل ماقاب المغيرة بن شعبة فأنقذه لها أبو بكر (رواه أبو داود)⁹⁵.

Artinya:

“Dari Qubaishah Zueb, dia berkata, “ Seorang nenek datang kepada Abu Bakar menanyakan soal kewarisannya, maka Abu Bakar menjawab, aku tidak menemukan hakmu dalam Al-Qur’an dan aku juga tidak menemukan hakmu dalam Hadist Nabi saw, karena itu, kembalilah dahulu, nanti aku menanyakan persoalanmu itu kepada orang lain, kemudian Abu Bakar menanyakan persoalan itu kepada orang-orang, maka, Al- Mughirah member jawaban, katanya:” aku berada dalam majelis Rasulullah saw dan beliau memberikan hak kewarisan bagi nenek seperenam”. Abu Bakar bertanya, “ apakah ada orang lain yang ikut bersamamu ? lalu Muhammad Bin Maslamah berdiri dan berkata seperti apa yang dikatakan oleh Al-Mughirah. Maka, Abu Bakar pun melaksanakannya”.

Berdasarkan kedua riwayat hadist tersebut diatas, kewarisan kakek dan nenek tidak disebutkan dalam Al-Qur’an, akan tetapi ditunjuk dalam hadist Rasulullah saw.

c. Ahli Waris yang Ditetapkan Melalui Ijtihad.

⁹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Cairo: Mustafa Al-Babiy. 152,h.109.

⁹⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Cairo: Mustafa Al-Babiy,h.108.

Ahli waris yang ditetapkan melalui ijtihad disini ialah ahli waris yang secara tidak langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan tidak juga dalam hadist Nabi saw. Akan tetapi, dapat dipahami melalui ijtihad dengan memperluas makna kata asal.

Dari ijtihad para ulama' kata asal tidak hanya terbatas pada makna anak, namun meliputi cucu, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Ahli waris melalui ijtihad menurut versi ahli sunnah, adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan melalui anak laki-laki.

d. Ahli Waris yang ditetapkan secara umum dalam Hadist

Yang dimaksud disini ialah ahli waris yang ditetapkan secara umum dalam hadist Nabi saw dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Ahli waris berdasarkan hadist Nabi diatas, selain yang tersebut sebelumnya, adalah:

1. Anak-anak dari cucu laki-laki dan seterusnya kebawah melalui laki-laki;
2. Ayahnya kakek dan seterusnya keatas;
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu);
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
5. Saudara ayah yang laki-laki seandung (seayah dan seibu);
6. Saudara ayah yang laki-laki seayah;
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung;
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah dan keturunannya melalui garis laki-laki.
9. Ahli Waris yang di Tunjuk dari Penjelasan Umum dalam Al-Qur'an

penjelasan umum yang dimaksud dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Anfaal ayat 75;

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Terjemahnya:

Berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁹⁶

Ahli waris berdasarkan petunjuk dalam kelompok a,b,c, dan d tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

1. Kelompok laki-laki terdiri dari:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah, lain ibu
 - g. Saudara laki-laki seibu lain ayah
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung)
 - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah lain ibu)
 - j. Saudara laki-laki ayah kandung (paman laki-laki dari ayah sekandung)
 - k. Saudara laki-laki ayah seayah (paman laki-laki dari ayah seayah)

⁹⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan,h.366.

- l. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung (sepupu laki-laki dari paman laki-laki dari ayah sekandung)
- m. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah (sepupu laki-laki dari paman laki-laki dari ayah seayah)
- n. Suami
2. Dari kelompok perempuan, yaitu :
 - a. Anak perempuan
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki)
 - c. Ibu
 - d. Ibu dari ibu (nenek dari ibu)
 - e. Ibu dari ayah (nenek dari ayah)
 - f. Saudara perempuan sekandung
 - g. Saudara perempuan seayah
 - h. Saudara perempuan seibu
 - i. Isteri

Ahli waris yang disebutkan secara umum dalam surat Al-Anfaal ayat 75 tersebut diatas adalah semua yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris yang belum tersebut diatas. Orang-orang yang disebutkan diatas, bila sendirian berhak menerima warisan. Namun, bila ahli waris terdiri dari beberapa orang dalam garis kerabat yang berbeda, maka hanya sebagian yang berhak, sedangkan yang lainnya tidak berhak. Hal ini didasarkan kepada dekatnya hubungan seseorang kepada pewaris. Yang lebih dekat menutup kesempatan yang lebih jauh untuk mendapatkan

hak kewarisan. Dalam hal ini berlakulah sistem tutup menutup (secara keseluruhan) atau hijab mahjub (secara hirman) atau dengan istilah sistem keutamaan.

Sistem Hijab Mahjub

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya sistem hijab mahjub (sistem menutup dan tertutup). Sistem ini diberlakukan jika seluruh ahli waris yang disebutkan diatas ada, sehingga tidak mungkin semuanya akan menerima harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Yang pasti menerima harta warisan itu hanya empat pihak yaitu: ayah, ibu, anak (baik laki-laki maupun perempuan, satu orang atau lebih), dan janda atau duda. Selebihnya tertutup atau terhalang menerima warisan.

Hijab artinya mendinding atau menghalangi ahli waris yang mempunyai hak, sehingga tidak memperoleh bagian warisan sama sekali, sedangkan hajib yaitu ahli waris yang mendinding atau menghalangi ahli waris yang lain untuk memperoleh bagian harta warisan.

Hijab dalam hukum kewarisan Islam ada dua macam yaitu;

- a. Hijab Nuqshan yaitu, halangan yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan harta warisan bagi ahli waris, karena ada ahli waris yang lain bersama sama dengan dia, misalnya, ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ bagian. Akan tetapi, apabila orang yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu atau beberapa orang saudara, maka ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan.
- b. Hijab Hirman yaitu, dinding atau halangan yang menghalangi untuk mendapatkan warisan, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang mneinggal itu, sehingga dia tertutup,

tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali, misalnya cucu laki-laki tidak mendapat warisan selama masih ada anak laki-laki yang masih hidup.

Dari duapuluh tiga jumlah ahli waris ada ahli waris yang sama sekali tidak bisa terdinding atau terhalangi untuk mendapatkan harta warisan, sehingga ia mesti mendapatkan hak bagian warisan. Mereka itu ada enam ahli waris yaitu;

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. Anak laki-laki
- d. Anak perempuan
- e. Janda
- f. Duda

5. kelompok Ahli Waris dan Bagiannya.

Secara garis besar Hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti dan ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan. Oleh karena itu akan dijelaskan dan dibahas secara terperinci mengenai kedua macam ahli waris itu serta bagiannya masing-masing.

a. Ahli Waris Dzawil Furudh

Ahli waris Dzawil Furudh adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan atau hadist Nabi saw, mereka menerima harta warisan dalam urutan pertama. Bagian-bagian tertentu dalam Al-Qur'an adalah; $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Ahli waris yang mendapat hak bagian menurut angka-angka tersebut disebut sebagai ahli waris Dzawil Furudh. Ahli waris yang menurut hukum kewarisan Islam berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupnya, dan bagian masing-

masing sudah ditentukan itu adalah empat orang dari kalangan laki-laki dan 8 orang dari kalangan perempuan.

1. Dari kalangan laki-laki empat orang ialah.

a. Ayah bagiannya:

- a) $\frac{1}{6}$ bila bersama ada anak atau cucu
- b) Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki.
- 3) dan kemudian mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.

b. Kakek dan terus keatas, bagiannya:

- 1). $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu.
- 2). Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki.
- 3). $\frac{1}{6}$ kemudian sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu perempuan.

c. Saudara laki-laki seibu, bagiannya:

- 1). $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang
- 2). $\frac{1}{3}$ bila untuk dua orang atau lebih

d. Duda bagiannya:

- 1). $\frac{1}{2}$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu
- 2). $\frac{1}{4}$ bila bersamanya ada anak atau cucu

2. Dari kalangan perempuan delapan orang yaitu:

a. Ibu bagiannya:

- 1). $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu atau beberapa orang saudara.
- 2). $\frac{1}{3}$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu atau dua saudara.
- 3). $\frac{1}{3}$ dari sisa bila dia bersama ayah, duda atau janda dan tidak bersamanya anak atau cucu.

b. Anak Perempuan, bagiannya;

- 1). $\frac{1}{2}$ bila anak perempuan hanya seorang
- 2). $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua orang atau lebih disertai dengan ada anak laki-laki.

c. Cucu Perempuan dari anak laki-laki, bagiannya:

- 1). $\frac{1}{2}$ bila cucu perempuan hanya seorang
- 2). $\frac{2}{3}$ bila cucu perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai dengan cucu laki-laki.
- 3). $\frac{1}{6}$ bila cucu perempuan disertai dengan seorang anak perempuan.

d. Nenek, baik melalui garis ayah atau ibu seorang atau lebih mendapat $\frac{1}{6}$.

e. Saudara Perempuan Sekandung, bagiannya:

- 1). $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang
- 2). $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki.
- 3). Mengambil sisa harta bila bersamanya dengan anak perempuan

f. Saudara Perempuan Seayah, bagiannya:

- 1). $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang.
- 2). $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki.
- 3). $\frac{1}{6}$ bila bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung.
- 4). Mengambil sisa harta bila bersamanya dengan anak perempuan.

g. Saudara Perempuan seibu, bagiannya;

- 1). $\frac{1}{6}$ bila dia seorang saja.
- 2). $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih

h. Janda, bagiannya

- 1). 1/4 bila bersamanya tidak ada anak atau cucu.
- 2). 1/8 bila bersamanya ada anak atau cucu

Ahli waris Dzawil Furudh tersebut diatas, ketika dia sendirian, maka dia mengambil hak bagiannya yang sudah ditentukan, demikian pula ketika lebih dari satu orang, maka masing-masing juga mengambil hak bagiannya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan

b. Ahli Waris Ashabah

Ahli waris Ashabah ialah ahli waris yang berhak, namun didalam Al-Qur'an dan atau Hadist Nabi saw, tidak dijelaskan bagiannya. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila ada bersamanya ahli waris Dzawil Furudh dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris Dzawil Furudh yang ada bersamanya.

Dasar hukum dari kewarisan Ashabah ini adalah sabda Rasulullah saw, dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْحَقُّوْا الْاَقْرَبَ اِيْضًا بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁹⁷

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, “ Rasulullah saw, Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat” (Muttafaq Alaihi).

Ahli waris Ashabah itu ada tiga tingkatan, yaitu:

1. Ashabah Bi Nafsi yaitu, ahli waris yang menjadi ashabah karena dirinya sendiri. Mereka semua adalah laki-laki, dan dari ahli waris laki-laki dibawah ini yang

⁹⁷(صحيح) Hadist ini Shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1287).

berhak menjadi ashabah hanyalah satu tingkat, menurut urutan adalah sebagai berikut:

- a. Anak;
- b. Cucu;
- c. Ayah;
- d. kakek;
- e. Saudara Kandung;
- f. Saudara seAyah
- g. Anak Saudara Sekandung;
- h. Anak Saudara Seayah;
- i. Paman Sekandung;
- j. Paman seayah;
- k. Anak Paman kandung;
- l. Anak Paman se ayah.

Apabila ahli waris yang berkedudukan sebagai ahli waris Ashabah ini hanya seorang, maka ia mengambil semua harta dan apabila lebih dari seorang dalam tingkatan yang sama, mereka berbagi sama banyak, bila bersamanya ada ahli waris sebagai Dzawil Furudh, maka lebih dahulu kepada ahli waris Dzawil Furudh itu diberikan hak bagiannya yang sudah ditentukan, lalu sisanya untuk ahli waris Ashabah.

2. Ashabah Bi Ghairihi yaitu, ahli waris yang mulanya bukan ahli waris Ashabah karena dia perempuan, namun karena didampingi oleh saudaranya yang laki-laki, maka menjadi ahli waris ashabah. Mereka adalah:

- a. Anak perempuan sewaktu didampingi saudara laki-laki;

- b. Cucu perempuan sewaktu didampingi oleh cucu laki-laki;
- c. Saudara Perempuan Kandung sewaktu didampingi saudara laki-laki sekandung;
- d. Saudara perempuan seayah sewaktu didampingi saudara laki-laki seayah.

Hak bagian ahli waris Ashabah Bi Ghairihi ini ialah satu berbanding dua dengan hak bagian ahli waris ashabah laki-laki, yakni oleh karena duanya sebagai ashabah, maka seluruh sisa dari harta peninggalan dibagi diantara keduanya dengan bandingan seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

3. Ashabah Ma'al Ghairihi yaitu, ahli waris yang semula bukan ashabah, namun karena ada ahli waris tertentu bersamanya yang bukan ashabah, maka dia menjadi ashabah, sedangkan ahli waris lain tersebut tidak ikut menjadi ashabah, yang termaksud dalam kategori ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah bila bersama dengan anak perempuan.

Dasar hukum adanya ahli waris ashabah ma'al ghairi ini adalah hadist Nabi saw, dari Hudzail Bin Syurhabil, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nisa, Ibnu Majah, Abu Daud dan Al-Turmudzi:

عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة و أخت فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتا بعني فسئل ابن مسعود رضى الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللب اذا وما من المهتدين أقصى فيها بما قضى النبي صلعم للأبنة النصف وللأبنة ابن السدس تكملة الثلاثين وما بقي فللأخت.⁹⁸

Artinya:

“Dari Huzail Bin Syurhabil, dia berkata,” Abu Musa Al-Asy’ari ditanya mengenai bagian anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki beserta saudara perempuan kandung seayah”, dia menjawab:” untuk anak perempuan

⁹⁸Drs.H. Adnan Qohar, Drs.H.A. Choiri, SH, MH dan Dr.H.M.Muslich Ks,*Hukum kewarisan Islam, Keadilan, dan Metode Praktis penyelesaiannya*,h.186.

mendapat separuh, untuk saudara perempuan kandung atau seayah mendapat separuh, dan datanglah le Ibnu Mas'ud niscaya dia akan mengikuti aku". Kemudian, ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan diberitahukan apa yang dikatakan oleh Abu Musa, maka dia menjawab, "sungguh aku berada dalam kesesatan jika demikian yang aku lakukandan aku tidak termaksud orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dalam hal ini aku menghukumi dengan apa yang ditetapkan Rasulullah saw, yaitu untuk anak perempuan mendapat separuh, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam guna menggenapi dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan atau seayah".

c. Ahli Waris Dzawil Arham

Ahli waris Dzawil Arham ialah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagian dalam Al-Qur'an dan atau Hadist Nabi saw, sebagai Dzawil Furudh dan tidak pula dalam kelompok Ashabah. Bila kerabat yang menjadi ashabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka Dzawil Arham itu perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan.

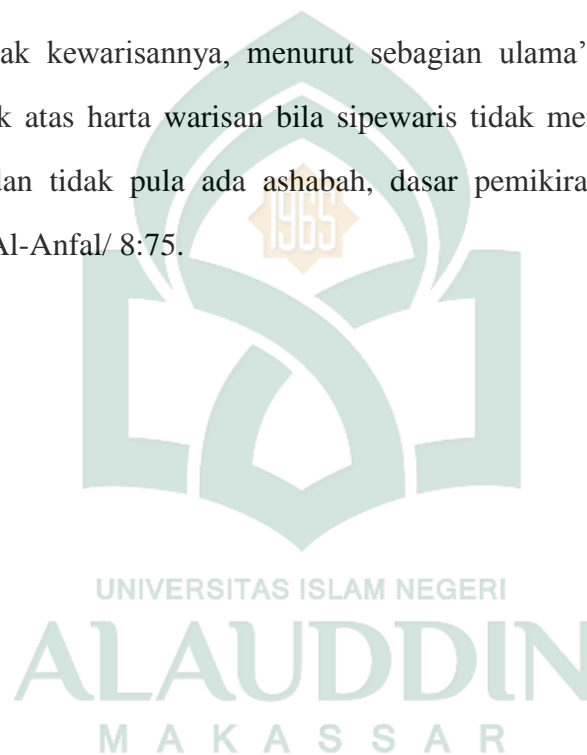
Dzawil Arham itu dapat dikelompokkan kedalam empat macam sesuai dengan garis keturunan, yaitu:

1. Garis keturunan lurus kebawah, yaitu;
 - a. Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan keturunannya;
 - b. Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya;
2. Garis keturunan lurus ketas, yaitu:
 - a. Ayah dari ibu dan seterusnya keatas;
 - b. Ayah dari ibunya ibu dan seterusnya.
3. Garis keturunan kesamping pertama, yaitu:
 - a. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung seayah dengan anaknya;
 - b. Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya kebawah.

4. Garis keturunan kesamping kedua, yaitu:

- a. Saudara perempuan (kandung, seayah, atau seibu) dari ayah dan seterusnya kebawah.
- b. Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya kebawah.
- c. Saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah, atau seibu) dari ibu dan seterusnya kebawah.

Tentang hak kewarisannya, menurut sebagian ulama', mereka adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan bila sipewaris tidak meninggalkan ahli waris Dzawil Furudh dan tidak pula ada ashabah, dasar pemikiran para ulama adalah Al-Qur'an surah Al-Anfal/ 8:75.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian “*field research kualitatif*” yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang dengan menfokuskan penelitian pada dokumen-dokumen putusan yang telah diputus di Pengadilan Agama Pinrang

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam undang-undang yang mengatur tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama dapat dilihat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”⁹⁹ Pasal 2 “ Peradilan Agama Merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”¹⁰⁰ dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 49 “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

⁹⁹Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama* Pasal 1 ayat (1),h.237

¹⁰⁰Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama* Pasal , h. 237.

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, Wasiat, Hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
- c. Wakaf dan Shadaqah¹⁰¹
- d. Ekonomi Syariah. (UU. No.3 Tahun 2006).¹⁰²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Pendekatan Teologi Normatif (*syar'i*), yaitu dikaji berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan Islam, karena didalam ayat Al-Qur'an dan Hadis dijelaskan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan hukum kewarisan berdasarkan aturan Agama Islam.
2. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Hukum kewarisan berupa Undang-undang Tentang Peradilan Agama, Inpres Presiden RI No. 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Peradilan Agama.

C. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Sumber data Primer yaitu: Data yang diperoleh dari penelitian putusan-putusan yang berkaitan dengan masalah sengketa kewarisan yang ada di Pengadilan Agama Pinrang.

¹⁰¹Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama pasal 49.* h, 251.

¹⁰²Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 *Tentang Peradilan Agama* atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama* Pasal 49 ayat i. h. 31.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku yang memuat tentang norma hukum, baik norma Syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarisan Islam di Pengadilan Agama.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode wawancara dan Pengumpulan data-data berupa Putusan Hakim mengenai sengketa kewarisan.

1. Pengumpulan data-data Putusan Hakim Pengadilan Agama yaitu: mengumpulkan data-data putusan Hakim pengadilan sebagai bukti bahwa benar telah terjadi sengketa kewarisan dan melihat bagaimana pertimbangan Hukum yang diberikan dari Pengadilan.
2. Metode wawancara yaitu: melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B yaitu Bapak Drs. H. Pandi, SH, MH, yang berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Pinrang yang beralamat di Jalan Bintang Kabupaten Pinrang, tentang bagaimana cara penyelesaian kasus sengketa kewarisan yang ada di Pengadilan Agama.

E. Instrument Penelitian

Instrument yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu berupa note book atau buku catatan yang dipergunakan untuk wawancara, daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat melakukan kegiatan wawancara dilokasi penelitian serta laptop untuk menyusun skripsi ini.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu:

Data yang telah terkumpul melalui wawancara dan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen putusan hakim Pengadilan Agama mengenai sengketa kewarisan akan dikaji dan dianalisis, kemudian akan dilakukan pemeriksaan data, penandaan, penyusunan data dan sistematisasi (*sistematuizing*) berdasarkan pokok permasalahan dan sub masalah.

2. Analisis Data

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi adalah jenis penelitian kualitatif, maka untuk menganalisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara menyesuaikan data atau dokumen yang telah ada seperti data primer yang bersumber dari buku-buku yang mendukung dengan judul yang akan dibahas dan dokumen-dokumen putusan hakim mengenai sengketa kewarisan dan hasil wawancara yang telah dilakukan kemudian akan dianalisis secara kualitatif

G. Pengujian Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan judul yang akan dibahas dan putusan hakim yang diperoleh akan disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas. Apakah putusan hakim yang diperoleh sesuai dengan judul dan permasalahan yang dibahas atau tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989), Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989), Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989).

Sebagaimana di jelaskan diatas tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Pinrang yang berlokasi di Jalan Bintang, Kabupaten Pinrang. Letak Geografis Pengadilan Agama Pinrang terletak Di Kabupaten Pinrang, dengan keadaan Geografis Terletak antara :

Lintang Selatan : 30 19' 13" - 40 10' 30"

Bujur Timur : 1190 26' 30" - 1190 47' 20"

Kabupaten Pinrang Terletak dibagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah 1.961.77 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Tanah Toraja

Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang

Sebelah Selatan : Kotamadya Pare-Pare

Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa dan Selat Makassar¹⁰³

Secara Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri dari 104 Desa/Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang

Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B telah diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-pokok kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970 dengan perubahannya yaitu undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tugas pokok peradilan pada umumnya dan Peradilan Agama pada khususnya ialah:menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Agama Pinrang adalah salah satu Lembaga peradilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman.

B. Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris terhadap Kerukunan Keluarga.

Agama Islam adalah Agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, ketertiban dan keamanan. Damai atau *islah* merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga segala bentuk tindakan yang menjurus kepada perselisihan yang menimbulkan *mudharat* agar dihindari.

¹⁰³Pengadilan Agama Pinrang, Letak geografis dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Pinrang, Situs Resmi PA. Pinrang. <http://www.pa-Pinrang.go.id/index.php> (24 ferbruari 2015).

Sejalan dengan hal itu pembagian harta warisan yang seharusnya menjadikan hidup para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka pembagian harta warisan pun harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum *Islam* dan tidak melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan berbagai alasan yang pada akhirnya menimbulkan konflik internal antara sesama ahli waris.

Adapun dampak yang timbul dari adanya penundaan pembagian harta warisan itu yaitu:

1. Penguasaan Harta oleh salah satu pihak anggota keluarga (ahli waris)

Penguasaan harta oleh salah satu pihak anggota keluarga (ahli waris) dapat terjadi akibat adanya penundaan pembagian harta warisan yang cukup lama, seperti pada perkara No 35/ptd.G/2012/PA.Prg. pada kasus ini salah satu pihak yaitu Tangnga Bin La Emba yang juga merupakan anak dari pewaris La Emba Bin Latola dan I Rabi Binti Labdaru ini menguasai harta warisan yang belum dibagi secara Hukum Islam berdasarkan alasan duduknya perkara:

- a. Bahwa La Emba Bin Latola telah meninggal dunia pada tanggal 12 februari 1992 di lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang karena sakit, namun semasa hidupnya La Emba Bin Latola telah menikah dengan I Rabi Binti Labadaru pada tahun 1953, dan istri La Emba Bin Latola yaitu I Rabi Binti Labadaru masih hidup dalam perkara ini I Rabi Binti Labadaru (sebagai Janda / Penggugat I).
- b. Bahwa semasa hidupnya La Emba Bin Latola dengan Istrinya I Rabi Binti Labdaru mereka dikaruniai tujuh orang anak kandung masing-masing bernama:

- 1) La Tangnga Bin La Emba. (Tergugat)
 - 2) La Sunre Bin La Emba (Penggugat II)
 - 3) I Sana Binti La Emba (Penggugat III)
 - 4) Parakkasi Bin La Emba (Penggugat IV)
 - 5) Abbas Bin La Emba (Penggugat V)
 - 6) La Billo Bin La Emba (Penggugat VI)
 - 7) Adam Bin La Emba (Penggugat VII)
- c. Bahwa Almarhum La Emba Bin Latola disamping meninggalkan seorang Janda dan tujuh orang anak kandung sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum La Emba Bin Latola, La Emba Bin Latola juga meninggalkan harta warisan berupa:
- d. Tanah sawah seluas kurang lebih 7758 m² (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi) dengan sertifikat Hakn Milik (SHM) Nomor 485 atas nama La Emba Bin Latola, yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten Pinrang pada tanggal 13-11-1995 dengan SPPT Tahun 2011 NOP 73.15.040.010.025.0003.0 yang terletak di lingkungan Rubae, kelurahan Bentengnge kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Pada sebelah utara berbatasan dengan jalanan
 - 2) Pada sebelah timur berbatasan dengan sawah H. Lapanganro
 - 3) Pada sebelah selatan berbatasan dengan sawah H. Lapanganro
 - 4) Pada sebelah barat berbatasan dengan sawah lakaddini.
- e. Tanah Darat (Tanah Kebun) seluas kurang lebih 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) dengan SPPT tahun 2011 NOP 73.15.050.007.025.0084.0

atas nama La Emba Bin latola yang terletak di dusun Dara Batu, Kelurahan Sipatuo, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Pada sebelah utara berbatasan dengan jalan
 - 2) Pada sebelah timur berbatasan dengan kebun Lacondding
 - 3) Pada sebelah selatan berbatasan dengan kebun Laraupong
 - 4) Pada sebelah barat berbatasan dengan kebun Umar.
- f. Bahwa tanah sawah dan darat (kebun) yang di uraikan pada nomor 4 dan 5 diatas selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai harta obyek sengketa.
- g. Bahwa harta obyek sengketa point 4 dan 5 tersebut merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum La Emba Bin Latola dan I Rabi Binti Labadaru, dan diperoleh selama mereka mengarungi bahtera rumah tangga.
- h. Bahwa oleh karena tanah sengketa point 4 dan 5 tersebut adalah masih merupakan harta bersama (gono-gini) antara almarhum La Emba Bin Latola bersama I Rabi Binti Labadaru yang belum pernah dibagi anatara almarhum La Emba Bin Latola bersama I Rabi Binti Labadaru, demikian pula harta obyek sengketa tersebut yang menjadi bagian atau hak almarhum La Emba Bin Latola adalah belum pernah dibagi menjadi harta warisan secara sah menurut hukum kewarisan antara para ahli waris sah dari almarhum La Emba Bin Latola yaitu para penggugat dan tergugat. Meskipun penggugat I,II,III,IV,V,VI dan VII telah berupaya menghubungi dan menemui baik secara langsung maupun dengan perantara sanak

keluarga dan pemerintah setempat, dengan maksud para penggugat yakni agar tergugat mau dan bersedia membagi-bagi harta obyek sengketa point 4 dan 5 tersebut serta memberikan dan meyerahkan kepada penggugat I,II,III,IV,V,VI dan VII yang menjadi bagian atau hak para penggugat secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik, akan tetapi tergugat tidak mau dan bahkan tergugat tersebut justru marah-marah kepada penggugat, sehingga karenanya usaha para penggugat tersebut tidak membuahkan hasil. Dengan demikian telah jelas, bahwa tergugat adalah sengaja merugikan para penggugat.

hal ini lah yang menjadi pemicu sehingga terjadi konflik diantara sesama ahli waris yang lain dan melakukan gugatan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.

2. Bercampurnya antara harta warisan dan harta bersama

Harta warisan yang ditunda pembagiannya juga bisa mengakibatkan adanya pencampuran harta warisan dan harta bersama yang dimiliki oleh pewaris dan ahli waris, seperti pada perkara No. 683/pdt.G/2013/ PA.Prg.

- a. Bahwa Hj.Sappe Binti Pairing telah meninggal dunia pada 12 Juli 2012 karena sakit, namun semasih hidupnya ia Hj. Sappe Binti Pairing telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni :
- b. Hj.Sappe Binti Pairing menikah (kawin) dengan Agus Pribadi Bint Magga pada tahun 1991, dalam pernikahan (perkawinan) antara Hj.Sappe Binti Pairing dengan suami pertamanya yaitu Agus Pribadi Bin Magga mereka (Hj.Sappe Binti Pairing dengan Agus Pribadi Binti Magga) telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni Gusmini Binti Agus (penggugat I) dan Irma Agus Binti Agus (Penggugat II).

- c. Agus Pribadi Bin Magga (suami pertama I Sappe Binti Pairing) meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2004 karena sakit.
- d. Tidak lama setelah suami pertamanya Hj.Sappe Binti Pairing yaitu Agus Pribadi Bin Magga meninggal dunia (meninggal dunia), maka pada tahun 2004 itu pula Hj.Sappe Binti Pairing menikah (kawin) dengan ahmad Fister (suami kedua dari Hj.Sappe Binti Pairing).
- e. Dalam pernikahan (perkawinan antara Hj.Sappe Binti Pairing dengan suami keduanya (ahmad Fister/tergugat) mereka (Hj.Sappe Binti Pairing dengan Ahmad Fister) telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sardilla Bin Ahmad (Turut Tergugat)
- f. Bahwa Hj.Sappe Binti Pairing tersebut di samping meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak dan seorang suami sebagaimana yang disebutkan diatas, juga almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing meninggalkan harta warisan berupa :
 - 1) Tanah perumahan berukuran kurang lebih 4 x 4 meter berikut sebuah rumah gardu (kios) yang berdiri diatasnya, yang terletak di Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
 - a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah obyek sengketa No.2.2
 - b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah La Muntaha
 - c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Sikkuala-Cempa

d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj.Timang.

2. Tanah perumahan berukuran kurang lebih 4 x 7 meter berikut sebuah rumah batu berlantai 2 (dua) yang berdiri diatasnya, yang terletak di Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan Ex Pasar Lama Cempa
- b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah La Muntaha
- c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah obyek sengketa No.2.1 diatas.
- d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj.Timang.

3. Tanah perumahan seluas kurang leboh 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah La emmang dan Mansi
- b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan
- c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Sikkuala-Cempa
- d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah I Bombang

4. Sebuah rumah batu berlantai 2 (dua) atau bertingkat 2 (dua) berukuran kurang lebih 7 x 15 meter, yang berdiri diatas tanah perumahan yang disebutkan pada point 2.3 diatas, yang terletak di Cempa, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan rumah La Emmang dan Mansi
- b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan
- c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Sikkuala-Cempa

d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan rumah I Bombang

5. Uang sejumlah (sebesar) Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yaitu berupa Modal Usaha Jual-Beli Barang Campuran atau isi rumah gardu (kios) No.2.1 dan No.2.2 .

f. Prabot rumah tangga atau isi rumah NO.2.3 diatas adalah berupa :

1. 1 (satu) set kursi tamu
2. 2 (dua) buah rusban kayu dengan kasurnya
3. 4 (empat) buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu
4. 1 (satu) buah kulkas (lemari Es) merek
5. 1 (satu) buah televisi merek

g. Perhiasan yang terbuat dari emas 23 karat berupa :

1. 2 (dua) buah kalung emas masing-masing seberat 20 (dua puluh) gram
2. 2 (dua) buah gelang emas yang masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram.

h. satu Unit Sepeda Motor Metic Spin warna merah, dengan No.Polisi DD 4686 DC

i. Satu Unit Mobil Toyot Avansa warna biru tua, dengan No.Polisi DP 1224 DC.

g. Bahwa harta-harta benda (kekayaan) yang disebutkan pada huruf a, b,c, d, e, f, g, h, dan i diatas yang selanjutnya di dalam Gugatan ini disebut sebagai harta obyek sengketa atau obyek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i

h. Bahwa harta obyek sengketa yang disebutkan pada huruf a diatas adalah harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum Agus Pribadi Bin Magga

dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairirng, karena harta tersebut adalah diperoleh Agus Pribadi Bin Magga dengan Hj. Sappe Binti Pairing setelah mereka terikat dengan tali ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah antara Agus Pribadi Bin Magga dengan Hj. Sappe Binti Pairing tersebut. Oleh karena harta obyek sengketa huruf a tersebut adalah dibeli oleh Agus Pribadi Bin Magga bersama dengan Hj. Sappe Binti Pairirng dari H. Solihin pada tahun 2003, meskipun Akta Jual-Beli atas obyek sengketa huruf a tersebut nanti dibuatkan pada tahun 2006 yaitu setelah Agus Pribadi Bin Magga meninggal dunia, sebab tidak lama setelah terjadinya transaksi jual-beli atas harta obyek sengketa huruf a tersebut, lalu H.Solihin pergi merantau dan nanti H. Solihing kembali dari perantauan pada tahun 2006, sehingga nanti pada tahun 2006 itu pula baru Akta Jual-Beli atas harta obyek sengketa huruf a tersebut diterbitkan dan pada waktu itu Agus Pribadi Bin Magga telah meninggal dunia, karena Agus Pribadi Bin Magga meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2004. Akan tetapi SPPT / BPP atas obyek sengketa huruf a tersebut adalah masih tetap terdaftar atas nama Hj. Sappe Agus sampai sekarang (tahun 2013).

- i. Bahwa harta obyek sengketa huruf c yang berupa tanah perumahan yang ditempati berdiri rumah batu permanen yang berlantai 2 (dua) atau bertingkat 2 (dua) yaitu rumah batu obyek sengketa huruf d diatas, adalah benar dibeli pada tahun 2007 oleh ibu kandung Penggugat I (Gusmini Binti Agus), Penggugat II (Irma Agus Binti Agus) dan Tergugat II (Sardilla Bin Ahmad yaitu Hj. Sappe Binti Pairing dari Hj. Sanawiah, tapi uang yang dipergunakan atau yang dipakai oleh I Sappe Binti Pairing

membeli tanah perumahan obyek sengketa huruf c tersebut adalah uang bersama Agus Pribadi Bin Magga dengan I Sappe Binti Pairing, sehingga dengan demikian tanah obyek sengketa huruf c tersebut adalah merupakan pula harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum. Agus Pribadi Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut

- j. Bahwa demikian pula Perhiasan Emas 23 karat yang disebutkan pada huruf g diatas adalah harta bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj Sappe Binti Pairing dengan almarhum. Agus Pribadi Bin Magga, karena 2 (dua) buah kalung Emas 23 karat dan 2 (dua) buah gelang Emas 23 karat tersebut adalah diperoleh I Sappe Binti Pairing bersama dengan almarhum. Agus Pribadi Bin Magga pada waktu Hj. Sappe Binti Pairing masih terikat dengan tali ikatan perkawinan yang sah dengan Agus Pribadi Bin Magga tersebut.
- k. Bahwa sedangkan harta obyek sengketa huruf b yang berupa tanah perumahan berukuran kurang lebih 4 x 7 meter berikut sebuah rumah batu berlantai 2 (dua) yang berdiri diatasnya adalah merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat, karena harta obyek sengketa huruf b tersebut nanti diperoleh almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing ketika Hj. Sappe Binti Pairing terikat dengan tali ikatan pernikahan (perkawinan) dengan Tergugat
- l. Bahwa demikian pula obyek sengketa huruf d yaitu berupa sebuah rumah batu permanen yang berlantai 2 (dua) atau bertingkat 2 (dua) yang berdiri diatas tanah perumahan obyek sengketa huruf b tersebut beserta isinya atau prabotnya (obyek sengketa huruf d tersebut) adalah merupakan harta

bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Ahmad Fister (Tergugat). Sebab harta-harta obyek sengketa a quo dalam hal ini obyek sengketa huruf b dan d tersebut adalah nanti diperoleh Hj. Sappe Binti Pairing setelah ia Hj. Sappe Binti Pairing menikah (kawin) dengan suami keduanya yaitu Ahmad Fister (Tergugat) tersebut

- m. Bahwa demikian pula obyek sengketa huruf h yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Metic Spin warna merah, dengan No. Polisi DD 4686 HJ., adalah harta bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat, karena 1 (satu) Unit Sepeda Motor Metic Spin tersebut dibeli Hj. Sappe Binti Pairing setelah ia Hj. Sappe Binti Pairing menikah (kawin) dengan Tergugat tersebut
- n. Bahwa obyek sengketa huruf i yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa dengan No. Polisi DP 1224 DC adalah juga harta bersama antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat, meskipun 1 (satu) Mobil Toyota Avansa dengan No. Polisi DP 1224 DC tersebut nanti dibeli oleh Tergugat setelah Hj. Sappe Binti Pairing meninggal dunia, namun karena uang yang dipakai oleh Tergugat membeli obyek sengketa huruf i tersebut adalah uang hasil penjual 1 (satu) Unit Mobil Pik Cup merek Suzuky Fitura warna Hitam milik almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing yang dijual oleh Tergugat setelah Hj. Sappe Binti Pairing meninggal dunia ditambah dengan uang simpanan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing yang dipergunakan oleh Tergugat membeli obyek sengketa huruf i tersebut. Dengan demikian obyek sengketa huruf i tersebut adalah

merupakan pula sebagai harta bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat tersebut.

- o. Bahwa sedangkan harta obyek sengketa huruf e yaitu modal usaha yang berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), di mana obyek sengketa huruf e tersebut adalah sebagian atau 50 % dan/atau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama antara almarhum. Agus Pribadi Bin Magga dengan almarhumah HJ. Sappe Binti Pairing dan separuhnya lagi yaitu 50 % atau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat.
- p. Bahwa harta-harta obyek sengketa yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum. Agus Pribadi Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing yaitu harta obyek sengketa huruf a, c dan g adalah belum pernah dibagi antara almarhum. Agus Pribadi Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing , demikian pula obyek sengketa huruf a, c dan g tersebut adalah belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris almarhum Agus Pribadi Bin Magga dan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut.
- q. Bahwa demikian pula harta-harta obyek sengketa yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat yaitu harta obyek sengketa huruf b, d, f, g, h dan i adalah belum pernah dibagi antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat, demikian pula harta obyek sengketa huruf b, d, f, g, h dan i

tersebut adalah belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut

- r. Bahwa harta obyek sengketa huruf e yaitu modal usaha yang berupa uang sejumlah/sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) baik yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum. Agus Pribadi Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing adalah belum pernah dibagi antara almarhum Agus Pribadi Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing demikian pula harta obyek sengketa tersebut adalah belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari almarhum Agus Pribadi Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing, maupun yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat adalah belum pernah dibagi kepada almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat, demikian pula harta obyek sengketa tersebut adalah belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut.
- s. Bahwa harta-harta obyek sengketa tersebut yaitu baik yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhum. Agus Pribadi Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing maupun yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat adalah belum pernah ada yang dibagi baik antara almarhum. Agus Pribadi Bin Magga dengan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing, maupun antara almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing dengan Tergugat, demikian pula belum ada yang dibagi waris kepada segenap ahli

waris sah dari almarhum Agus Pribadi Bin Magga (menjadi bagiannya) dan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut. Namun keseluruhan harta obyek sengketa tersebut adalah dikuasai oleh Tergugat, meskipun Penggugat I dan II telah beberapa kali menghubungi dan menemui Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga, dengan maksud Penggugat-Penggugat tersebut yakni agar Tergugat bersedia dan mau membagi dan menyerahkan bagian atau hak Penggugat-Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum Agus Pribadi Bin Magga dan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut kepada Para Penggugat yang menjadi bagian atau hak Penggugat dari almarhum. Agus Pribadi Bin Magga dan almarhumah Hj. Sappe Binti Pairing tersebut atas harta obyek sengketa huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik. Namun maksud baik Penggugat I dan II tersebut adalah ditanggapi secara tidak wajar oleh Tergugat dan bahkan Tergugat marah-marah kepada Para Penggugat. Sehingga upaya Penggugat I dan II tidak membuahkan hasil.

3. Berubahnya status harta Warisan menjadi harta milik pribadi oleh salah satu pihak.

Perubahan status dari harta warisan menjadi harta milik ini dapat terjadi akibat adanya penundaan pembagian harta warisan yang cukup lama, sehingga salah satu pihak dari ahli waris menguasai harta warisan dan dapat menjadikannya sebagai harta milik pribadinya.

Seperti pada perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B dengan perkara Nomor 081/pdt.G/2013/PA.Prg.

a. Bahwa Ummarang Bin Manju telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2011 di Dusun/Kampung Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, karena sakit (terlampir foto copy Surat Keterangan Kematian). Namun semasa hidupnya Ummarang Bin Manju telah menikah (kawin) dengan Indo Tang Binti Lasadda pada tahun 1957, yang mana isteri Ummarang Bin Manju yaitu Indo Tang Binti Lasadda tersebut adalah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2007 di Dusun/Kampung Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro sompe, Kabupaten Pinrang, karena sakit (terlampir foto copy Surat Keterangan Kematian). Dengan demikian Indo Tang Binti Lasadda lebih dahulu meninggal dunia dari pada suaminya (Ummarang Bin Manju), karena Indo Tang Binti Lasadda meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2007, sedangkan Ummarang Bin Manju meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2011.

b. Bahwa semasa hidupnya Ummarang Bin Manju dengan isterinya yaitu Indo Tang Binti Lasadda mereka (Ummarang Bin Manju dengan Indo Tang Binti Lasadda) telah dikaruniai sebanyak 6 (enam) orang anak kandung yaitu masing-masing bernama :

1. Rasa Binti Ummarang (Tergugat I)
2. I Mande Binti Ummarang (Penggugat I)
3. Abd. Malik Bin Ummarang (Penggugat II)
4. Hadijah Binti Ummarang (Penggugat III)
5. Ridwan Bin Ummarang (Penggugat IV)
6. Abd. Latif Bin Ummarang (Tergugat V)

c. Bahwa almarhum Ummarang Bin Manju di samping meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum. Ummarang Bin Manju sebagaimana yang disebutkan pada Nomor : 2 (dua) point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6 diatas, juga almarhum Ummarang Bin Manju meninggalkan harta warisan berupa:

d. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are (0,30 Ha) yang terletak di Dusun/Kampung Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Pada sebelah Utara terdapat kebun H. Muhammad
- 2) Pada sebelah Timur terdapat kebun Ummarang
- 3) Pada sebelah Selatan terdapat saluran pembuangan air.
- 4) Pada sebelah Barat terdapat sawah Sumiati.

e. Tanah kebun seluas kurang lebih 70 are (0,70 Ha) yang terletak di Dusun/Kampung Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Pada sebelah Utara terdapat kebun Labasira dan Sumiati
- 2) Pada sebelah Timur terdapat Pamrud (Jalanan Tani)
- 3) Pada sebelah Selatan terdapat sawah Lajumalla
- 4) Pada sebelah Barat terdapat kebun H. Muhammad dan Lajanin.

f. Bahwa harta warisan yang diuraikan pada bagian No.3 (tiga) huruf a dan b diatas yang selanjutnya dalam Surat Gugatan kewarisan ini disebut sebagai tanah obyek sengketa huruf a dan b atau harta obyek sengketa a dan b. Bahwa tanah obyek sengketa huruf a dan b tersebut adalah merupakan harta bawaan atau barang asal dari Ummarang Bin Manju. Oleh karena harta obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut

adalah diperoleh Ummarang Bin Manju sebagai warisan dari orang tuanya yaitu ayahnya yang bernama almarhum. Manju.

g. Bahwa tanah obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah menurut Hukum Kewarisan *Islam* (Hukukum Faraid) kepada para ahli waris sah dari almarhum Ummarang Bin Manju tersebut.

h. Bahwa pada waktu masih hidupnya Indo Tang Binti Lasadda di mana kedua tanah obyek sengketa tersebut dalam hal ini tanah obyek sengketa huruf a dan huruf b adalah dikuasai dan dikelola atau digarap oleh Ummarang Bin Manju yaitu ayah/Bapak kandung Para Penggugat dan Para Tergugat sampai dengan tahun 2008. Namun pada tahun 2009, karena ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Ummarang Bin Manju tersebut sakit-sakitan, maka tanah obyek sengketa huruf a dan huruf b adalah digarap dan dikelola oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II.

i. Bahwa setelah Ummarang Bin Manju meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut adalah dikuasai dan digarap atau dikelola terus oleh tergugat-tergugat tersebut sampai sekarang.

j. Bahwa, oleh karena Penggugat I, II, III dan IV juga sebagai ahli waris sah dari almarhum. Ummarang Bin Manju tersebut karenanya kami penggugat-penggugat telah beberapa kali menghubungi dan menemui secara langsung Tergugat I dan II dengan mengajak berbicara dan bermusyawarah dengan baik-baik dan kekeluargaan dengannya, supaya para tergugat bersedia dan mau membagi harta warisan almarhum. Ummarang Bin Manju dalam hal ini tanah obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut. Namun maksud baik kami penggugat -penggugat tersebut adalah ditanggapi secara tidak layak oleh tergugat I dan II dengan berbagai macam dalih dan

dalil yang tidak masuk akal, dan bahkan tergugat-tergugat tersebut marah-marah kepada kami para penggugat.

K. Bahwa meskipun demikian penggugat-penggugat adalah tetap bersabar dan kami para penggugat sangat menginginkan agar persoalan harta warisan ini diselesaikan secara musyawarah dengan baik-baik dan kekeluargaan, karenanya Penggugat I, II, III dan IV telah berupaya menghubungi dan menemui tergugat-tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga dan Pemerintah setempat (Kepala Desa), dengan maksud para penggugat yakni agar tergugat-tergugat mau dan bersedia membagi-bagi harta warisan tersebut. Namun maksud baik kami Penggugat I, II, III dan IV tersebut adalah tetap ditanggapi secara tidak layak oleh Para Tergugat, dan bahkan Para Tergugat marah-marah kepada kami Penggugat I, II, III dan IV seraya tergugat-tergugat mengatakan kepada kami penggugat-penggugat bahwa silahkan penggugat-penggugat mencari jalan ke mana saja tergugat-tergugat akan ikut, dan atau menggugatnya saja sekalian lewat Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang.

l. .Bahwa dari apa yang diuraikan pada bagian No.10 posita gugatan ini diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk menyelesaikan persoalan ini di luar proses peradilan, karenanya Para Penggugat mendaftarkannya perkara (gugatan) ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, dengan harapan semoga Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang dapat memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikannya secara benar dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama.

m. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari almarhum Umbarang Bin Manju yang belum pernah dibagi waris secara sah

(sebagaimana yang disinggung pada No.6 posita gugatan ini diatas), karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat I, II, III dan IV meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) tergugat-tergugat apakah itu berupa Akta Jual-Beli ataupun Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada penggugat-penggugat.

4. Memerlukan Biaya yang cukup Banyak dalam Kasus penyelesaiannya secara litigasi.

Penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan secara litigasi itu memerlukan banyak biaya, mulai dari proses pendaftaran perkara hingga pelaksanaan putusan yang diputuskan oleh hakim, apalagi jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan melakukan upaya hukum banding dan kasasi, ini lebih banyak lagi memerlukan biaya dan banyak waktu untuk proses nya,

Seperti pada perkara Nomor 35/ptd.G/2012/PA. Prg. Pada tingkat pertama memerlukan biaya sebesar Rp. 1.891.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Proses	: Rp 50.000,-
Panggilan	: Rp 150.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.650.000,-
Redaksi	: Rp 5000,-

Materai	: Rp 6000,-
Jumlah	: Rp 1.891.000,-

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan.

Proses pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam merupakan satu paket dengan penyelesaian biaya prosesi kematian, penyelesaian wasiat, hibah, hutang-hutang, dan lain sebagainya yang harus diperhitungkan dari jumlah harta peninggalan pewaris, oleh karena itu, asas kematian itu seyogyanya diartikan penyelesaian pembagian kewarisan sesegera mungkin dilaksanakan setelah acara ritual kematian selesai, upaya penyelesaian hutang-hutang termaksud persoalan yang harus disegerakan. Nabi saw, memperingatkan, bahwa jiwa (ruh) manusia masih tergadaai dengan hutang-hutang yang belum diselesaikan sehingga hutangnya itu diselesaikan oleh ahli warisnya (H.R. Muslim), oleh karena penyelesaian hutang piutang harus disegerakan pula, memang didalam hukum kewarisan Islam tidak dijeskan secara tegas berapa lama interpal waktu penyelesaian harta peninggalan dengan kematian sipewaris. Akan tetapi, Al-Qur'an telah secara rinci menentukan bagian masing-masing ahli waris jika telah ada seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, sesaat setelah ada kematian maka secara serta merta menimbulkan hak waris bagi sekalian ahli warisnya, dan masing-masing secara normatif telah dapat mengetahui besaran hak bagian yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, salah seorang yang menguasai harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, sama dengan menggenggam hak milik orang lain yang melekat tanggung jawab dunia akhirat, dikutip dalam sebuah hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)¹⁰⁴

Artinya:

Berikanlah Faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.

Dalam sabda Rasulullah saw, tersebut ada perintah untuk menyegerakan pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris atau siapapun kepada seluruh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Penundaan ini tidak ada nas secara tegas melarangnya namun mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari syariat. Dalam hukum kewarisan Islam ketika terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris. Praktik penangguhan ini apabila dilihat dengan asas kewarisan Islam yaitu asas ijbari, maka praktik ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki hukum kewarisan Islam yang menghendaki pembagian harta warisan segera setelah terjadi kematian.

Disinilah letak keistimewaan sistem hukum kewarisan Islam dimana dengan asas kewarisan akibat kematian ini maka sesaat setelah prosesi pemakaman suatu kematian seseorang, terbukalah hak pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Pada saat itu hubungan emosional silaturahmi para ahli waris masih sehat, obyek harta waris pun masih jelas jumlahnya, jelas yang menguasainya, dan belum ada pihak yang dirasakan telah banyak mengambil bunga keuntungan dari harta warisan tersebut, situasi seperti itu dapat mendorong

¹⁰⁴ Al-Bukhori, *Shahih Bukhariy*, Juz IV, (Cairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy.t.t,h.181.

penyelesaian pembagian harta warisan secara damai penuh kekeluargaan, sehingga pintu timbulnya pertengkaran dan perselisihan yang akan mengurangi tali kasih sayang dapat diminimalisir.

D. Cara Penyelesaian Kasus Sengketa Kewarisan yang Telah Tertunda Menurut Hukum Islam.

1. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam

Penyelesaian kasus penundaan pembagian harta warisan yang terjadi yaitu melalui proses litigasi, yaitu melalui lembaga Peradilan Agama yang memiliki kewenangan relative dalam menyelesaikan kasus Mal Waris, sebagaimana dalam undang-undang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama *Islam*.¹⁰⁵

Terhitung sejak tahun 1991, berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, bangsa Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum *Islam* (KHI) yang secara *de facto* maupun *de jure* menjadi pegangan utama umumnya para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Buku II kompilasi Hukum *Islam*, yang memuat tentang hukum kewarisan *Islam*, ini terdiri atas IV Bab dan 44 pasal, yakni mulai pasal 171 sampai pasal 214.

¹⁰⁵Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*,h.295.

Buku II KHI pada dasarnya mengatur ihwal ketentuan umum (Bab I Pasal 171), ahli waris (Bab II Pasal 172-175), besarnya bagian masing-masing ahli waris, (Bab III Pasal 176-191), aul dan rad (Bab IV Pasal 192-193), wasiat (Bab V Pasal 194-209), dan Hibah (Bab VI Pasal 210-214).

Setelah melakukan pengajian dengan seksama tentang hukum kewarisan Islam yang diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, dapat dikemukakan bahwa KHI merupakan rujukan utama dalam menyelesaikan kasus Mal Waris yang ada di Pengadilan Agama.

Penyelesaian Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan yang terjadi dalam proses penyelesaiannya haruslah merujuk dan memperhatikan aturan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber Hukum yang di gunakan dalam penyelesaian setiap sengketa yang ada di Pengadilan Agama, termaksud kasus sengketa Mal Waris yang terjadi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal ada empat yang menjadi perbedaan inti dari fikih mawaris yaitu: 1. Adanya harta bersama, 2 Bagian ayah seperenam apabila memiliki anak¹⁰⁶, 3 adanya Ahli waris pengganti 4 adanya Wasiatul Wajibah. Hal ini yang harus diperhatikan dalam penyelesaian kasus sengketa kewarisan yang tertunda oleh Hakim di Pengadilan Agama.

Proses penyelesaian sengketa kewarisan yaitu pertama Hakim Haruslah memperhatikan lokasi dimana terjadinya sengketa, sebab apabila lokasi terjadinya konflik tersebut tidak masuk dalam wilayah Pengadilan tersebut bertempat maka, perkara tersebut haruslah di tolak, karena tidak sesuai dengan kompetensi relative

¹⁰⁶Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994, maksud Pasal tersebut ialah ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

pengadilan tersebut, kemudian setelah melihat kompetensi relative maka haruslah diperiksa bahwa apakah betul perkara yang diajukan oleh penggugat memang betul adalah sengketa kewarisan atau bukan, setelah itu dilihat apakah yang melakukan gugatan di Pengadilan Agama tersebut adalah orang yang berhak atau bukan sebab apabila yang melakukan gugatan adalah orang yang tidak ada kaitannya maka gugatan tersebut dapat ditolak oleh pengadilan.

Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan oleh Hakim adalah memeriksa gugatan yang diajukan, menentukan harta warisan yang dibagi, kemudian menentukan ahli waris, menetapkan jumlah bagian-bagian ahli waris dan terakhir ialah membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Setelah Hakim melaksanakan semua proses tersebut maka setiap ahli waris yang berhak memperoleh bagian harta warisan wajib untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusannya, sebab putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta menghukum pihak yang kalah dalam persidangan untuk membayar biaya perkara yang dipergunakan selama proses persidangan.

2. Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang bersama bapak ketua Pengadilan Agama, Bapak Drs. H. Pandi, SH, MH mengatakan bahwa”

“Penyelesaian sengketa kewarisan karena adanya penundaan memang sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama, sebab apa yang telah diputuskan di Pengadilan dalam persidangan itu akan mengikat semua pihak dan dituntut agar

dilaksanakan, setuju ataupun tidak disetujui oleh salah satu pihak, tetap harus dilaksanakan, akan tetapi di Pengadilan Agama, sebelum dilaksanakan proses persidangan, maka terlebih dahulu diadakan mediasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh masing-masing pihak, agar tercapai perdamaian diantara para pihak,

Selain itu penyelesaian kasus sengketa kewarisan apabila para pihak setuju dan mau melaksanakan sesuai dengan kesepakatan maka penyelesaian sengketa tidak mesti sesuai dengan ketentuan 2:1, bisa saja berbeda, sebab para pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Hal ini dilakukan sebab masih banyak masyarakat yang memandang bahwa apa bila seorang anak yang telah ditinggal mati oleh orangtuanya dan telah dibagikan warisan sesuai yang diinginkan oleh orang tua, namun anak tidak ingin melaksanakannya dan menuntut harta sesuai dengan keinginannya, maka mereka akan dianggap oleh masyarakat sebagai anak yang durhaka dan tidak menghargai keputusan orang tua, walaupun jika dilihat dari sisi hukum hal ini menyalahi apa yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi jika hal ini dapat mencegah terjadinya konflik diantara sesama ahli waris, maka hal ini dipandang jauh lebih baik dari pada harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum namun menyisahkan permusuhan diantara sesama ahli waris, karena keadilan itu tidak dipandang berdasarkan pembagian yang sama rata, akan tetapi memberikan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Keadilan itu bukan dilihat dari satu sisi, akan tetapi keadilan itu adalah apa yang diterima oleh masyarakat tanpa adanya

perselisihan, meskipun dari segi kuantitas berbeda akan tetapi dapat diterima, maka hal itu adalah keadilan.¹⁰⁷



¹⁰⁷Drs.H. Pandi, SH,MH (54 tahun), Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B, *Wawancara*, Pinrang, 14 Januari 2015.

(Catatan: cara penyelesaian kasus sengketa kewarisan yang ada di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi hingga berTahun-Tahun lamanya itu bisa menimbulkan perselisihan diantara sesama ahli waris dan menyebabkan merenggannya tali persaudaraan diantara mereka. Agama Islam tidak mengajarkan tentang perpecahan diantara sesama muslim, justru Islam sangat menganjurkan untuk saling menyayangi dan menghargai sesama saudara, maka dari itu sangatlah penting untuk sesegera mungkin membagi harta warisan apabila telah selesai pengurusan Jenazah, guna menghindari konflik yang dapat timbul dikemudian hari.
2. Dalam Hukum Islam diperintahkan agar sesegera mungkin untuk membagikan harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, sebab di jelaskan dalam Hadis bahwa apabila seseorang yang telah meninggal dunia maka hanya ada tiga hal yang yang turut serta mengantar si mayit ketika dibawah ke kuburnya, tetapi dua macam kembali dan yang tetap hanya satu macam, dua macam yang kembali yaitu keluarga dan harta bendanya dan yang tetap mengikutinya adalah amal ibadanya (H.R. Bukhari dan Muslim), Meskipun demikian bukan berarti hanya amalan semasa hidupnya saja yang ia bawa, akan tetapi ia masih bisa memperoleh amalan dari amal jariyah, salah satu hal yang dapat memberikan amal jariyah yaitu meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh ahli warisnya dalam berbuat amalan shaleh. Untuk melaksanakan amalan shaleh tersebut maka diperlukan harta untuk menunjang perbuatannya agar dapat bersedekah dan membantu sesama yang membutuhkan, oleh

karenanya perlu dibagikan harta tersebut agar supaya segala tujuan yang baik yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Agama Islam itu tidak mengenal yang dinamakan sistem kewarisan kolektif atau kepemilikan secara bersama, sebab masing-masing ahli waris memiliki bagiannya masing-masing, dan bagian-bagian tersebut telah ditetapkan secara tegas didalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak satu orang pun yang dapat menguasai atau memiliki harta warisan secara pribadi atau bersama.

Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi hingga bertahun-tahun lamanya itu bisa menimbulkan perselisihan diantara sesama ahli waris dan menyebabkan merenggannya tali persaudaraan diantara mereka. Agama Islam tidak mengajarkan tentang perpecahan diantara sesama muslim, justru Islam sangat menganjurkan untuk saling menyayangi dan menghargai sesama saudara, maka dari itu sangatlah penting untuk sesegera mungkin membagi harta warisan apabila telah selesai pengurusan Jenazah, guna menghindari konflik yang dapat timbul dikemudian hari.

3. Cara penyelesaian Kasus Penundaan Pembagian harta warisan yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana diketahui bahwa diIndonesia Hukum-Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, agar supaya dapat diterima ditengah-tengah masyarakat maka telah dileburkan menjadi sebuah Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber Hukum yang dipergunakan sebagai landasan dalam memutuskan setiap perkara yang ada di Pengadilan Agama oleh Hakim Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 tentang kekuasaan pengadilan ayat 1 dan 3 “ Pasal 1 Pengadilan

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
- c. Wakaf dan Shadaqah.

Undang-undang Nomor 7 Pasal 49 ayat 3 “ Bidang Kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Penyelesaian kasus sengketa kewarisan dapat juga dilaksan¹akan berdasarkan kesepakatan para pihak, meskipun cara penyelesaiannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama, akan tetapi jika kesepakatan tersebut menemukan titik perdamaian maka hal itu jauh lebih baik dari pada harus menyelesaikan kasus sengketa tersebut melalui proses persidangan yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka hakim Pengadilan Agama cukup menetapkan apa saja yang menjadi kesepakatan para pihak dalam sebuah akta perdamaian.

B. Implikasi

Setelah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga”, maka implikasi penelitian adalah:

1. Diharapkan agar supaya pembagian harta warisan ditengah-tengah masyarakat lebih merujuk kepada Hukum Islam, agar tidak terjadi konflik sebab Hukum Islam itu berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana diketahui bahwa

1

tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an dalam menyelesaikan setiap permasalahan diantara sesama manusia.

2. Setelah dilakukan penelitian di Pengadilan Agama dan dapat dilihat bahwa banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya penundaan pembagian harta warisan, maka dari itu diharapkan agar supaya penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi cerminan bagi masyarakat agar supaya sesegera mungkin membagi harta warisan apabila telah selesai dilaksanakan pengurusan jenazah. Hal ini diharapkan agar supaya mencegah terjadinya konflik dikemudian hari antara sesama ahli waris.

3. Semoga penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam mengenali bagaimana sebenarnya Hukum Islam itu dan terkhusus bagaimana penyelesaian masalah kewarisan yang timbul ditengah-tengah masyarakat, terkhusus bagi umat agama Islam.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rasdiana, Lahir di Kab. Sinjai Pada tanggal 5 November 1993,

Comment [w1]:

anak kedua dari tiga bersaudara,

menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Kota Pare-Pare dan

Makassar dan selesai pada tahun 2005, pendidikan tingkat

Madrasah Tsanawiyah Pest. Pondok Madinah di Kota

Makassar di pada tahun 2008, dan Tingkat Aliyah di

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar Pada tahun 2011,

setelah menyelesaikan pendidikan tingkat Aliyah menyusun melanjutkan pendidikan

yang lebih tinggi pada kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun

yang sama dan memilih Prodi Peradilan Agama, dan selesai pada awal tahun 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Deperteman R.I, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: 2004
- Amin, Muhammad Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Damis, Harijah, *Memahami pembagian Harta Warisan Secara Damai*. Jakarta: MT. Al-Itqon, 2013.
- Effendi, Satria M Zein, *problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hamzah, Ibnu Al-Husaini Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadist-Hadist Rasul*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ismail, Bin Muhammad Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Mannan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Muhammad, Syekh Ali Ash Shahbuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Muhibbin, Moh dan Abdullah Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagaimana pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2012.
- Perpustakaan Nasional R.I, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- , *Himpunan peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014.
- Qohar, Adnan dkk, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan dan Metode Praktis Penyelesaiannya*, Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011.
- Republik Indonesia, Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2011.

- , *Inpres R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2011.
- , *Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara R.I Tahun 2006 Nomor 22. Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2011.
- , *Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 1991 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara R.I Tahun 1989 Nomor 49. Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2011.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid jilid III*. Semarang: Penerbit Asy-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Buku 12-13-14*, Bandung: PT. Alma'ti Arif, 1987.
- Shaleh, dkk, *Asbabul Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: CV. Penerbit Diponogoro.2000.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Permata Press, 2010.
- Tim-El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- .

